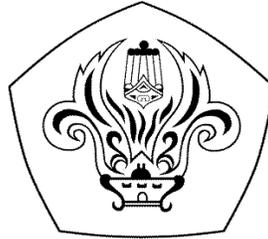


**LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

SPK Nomor: 646-SPK-LPPI/Untar/IX/2011



**ANALISIS DISPARITAS PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL
DI INDONESIA
TAHUN 2005 – 2009**

**Peneliti Utama:
Yusi Yusianto, SE.,ME**

**Anggota Peneliti:
KENI, SE.,MM**

**Fakultas Ekonomi
Universitas Tarumanagara
Jakarta
Desember 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia Tahun 2005 - 2009
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Yusi Yusianto, SE.,ME
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 10198017
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Bidang Keahlian : Ekonomi Pembangunan
 - g. Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen
 - h. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas / Jurusan
1	Keni, SE.,MM	Statistik	Ekonomi / Manajemen

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian
 - a. Jangka Waktu Penelitian: 3 bulan (Oktober – Desember 2011)
 - b. Biaya yang diusulkan : Rp 4.942.500,-
 - c. Biaya yang disetujui : Rp 4.000.000,-

Jakarta, Desember 2011

Mengetahui,
Dekan

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Sukrisno Agoes, MM, Ak., CPA
NIP: 10175004

Yusi Yusianto, SE.,ME
NIP: 10198017

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Ir. Jap Tji Beng, MMSI.,Ph.D
NIP: 100381047

RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2009. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan provinsi-provinsi yang PDRB per kapita tahun 2005 dapat tumbuh lebih cepat daripada provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya tinggi. Dari keempat jenis data PDRB, hanya PDRB harga konstan tahun 2000 yang menunjukkan signifikan secara statistik. Ini ditunjukkan dalam hasil pengukuran Baumol dan *absolute (unconditional) β convergence*.

Pengukuran *σ -convergence* menunjukkan bahwa meskipun tingkat dispersi masih lebih tinggi daripada tahun 2006, namun trennya cenderung menurun selama tahun 2005 – 2009. Oleh karenanya, kenaikan PDRB per kapita selama tahun 2005-2009 disertai dengan penurunan tingkat dispersi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa *σ -convergence* tidak sesuai dengan indeks Williamson.

Kata kunci: PDRB, provinsi, disparitas, konvergensi

SUMMARY

This research analyzes provinces economic growth in Indonesia from 2005 to 2009. It shows that provinces that most of low GRDP per capita in 2005 can growth faster than high GRDP per capita. From four types of GRDP data, only GRDP in constant price 2000 year that shows significant statistically. It is shown in Baumol and absolute (unconditional) β convergence measurement result.

The σ -convergence measurement shows that although dispersion rate still higher than 2006 year, but its trend tends to decline during 2005-2009. Therefore, increase GRDP per capita during 2005-2009 year is accompanied by disparity rate decline. But the research shows also that σ -convergence is not appropriate with Williamson index calculation result.

Key words: GRDP, province, disparity, convergence

PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur, akhirnya, Penelitian yang berjudul “Analisis Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia Tahun 2005 – 2009” ini dapat kami selesaikan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan September 2011 hingga Desember 2011.

Dalam pelaksanaan penelitian, kami mendapat dukungan dan bantuan dari banyak pihak, di antaranya, adalah:

- Bapak Ir. Jap Tji Beng, MMIS, Ph.D., Ketua LPPI, dan para staf LPPI, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian melalui program Hibah Penelitian Untar Tahun 2011.
- Bapak Ir. Basuki Anondho, MT., Ketua LPKM, yang telah mendorong dan memfasilitasi kami untuk mengerjakan penelitian di ruang kantornya.
- Bapak Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak.,MM., CPA., Dekan FE Untar, dan Dr. Ishak Ramli, SE., MM., Pudek I FE Untar, yang mendukung penelitian kami.
- Bapak Dr. Ir. Agus Zainul Arifin, MM., sebagai asesor waktu Monitoring dan Evaluasi (monev), yang memberi masukan bagi penelitian ini.
- Ibu Rhodiah, SE.,MM., sebagai perwakilan LPPI di FE Untar, yang telah bersedia membantu kelancaran administrasi
- Ibu Elsa Imelda, SE.,M.Si.,Ak., sebagai panitia Research Week 2011 perwakilan FE Untar, yang telah bersedia membantu membuat poster penelitian kami.
- Bapak Ir. Sunarjo Leman, MT., Bapak M. Nisfiannoor, M.Psi., Ibu Meiske Y. Suparman, M.Psi., dan Ibu Lydia Soelaiman, ST.,MT., yang selalu menemani dan saling menyemangati untuk menyelesaikan penelitian ini.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung kami tersebut, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2011

Yusi Yusianto, SE.,ME
Keni, SE., MM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN DAN SUMMARY	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
BAB IV METODE PENELITIAN	12
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	16
A. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto	16
B. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	19
C. Disparitas PDRB per Kapita	21
D. Pola Pertumbuhan PDRB per Kapita	23
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan	5
Tabel 5.1.	Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi, Tahun 2005-2009	16
Tabel 5.2.	Tingkat Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi, Tahun 2005-2009	17
Tabel 5.3.	Kontribusi Tingkat Pertumbuhan PDRB, Tahun 2005-2009	18
Tabel 5.4.	Posisi PDRB per Kapita Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009	20
Tabel 5.5.	Indeks Williamson Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009	22
Tabel 5.6.	Hasil Pengolahan Model Baumol pada PDRB per Kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009	23
Tabel 5.7.	Hasil Pengolahan β <i>Convergence</i> pada PDRB per Kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2005 – 2009	24
Tabel 5.8.	Hasil Pengolahan σ <i>Convergence</i> pada PDRB per Kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2005 – 2009	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Diagram Alir Penelitian	12
Gambar 5.1.	Konvergensi PDRB per Kapita Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009	25
Gambar 5.2.	Dispersi PDRB per Kapita Tahun 2005-2009	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 - 2009
- Lampiran 1.b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 – 2009
- Lampiran 1.c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2005 – 2009
- Lampiran 1.d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2005 – 2009
- Lampiran 2 Location Quotient (LQ) Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2005 dan 2009
- Lampiran 3.a. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2005 – 2009
- Lampiran 3.b. PDRB per Kapita Tanpa Migas atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2005 - 2009
- Lampiran 3.c. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2005 – 2009
- Lampiran 3.d. PDRB per Kapita Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2005 - 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun indikator pembangunan ekonomi nasional suatu negara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, namun apabila pertumbuhan tersebut disertai dengan ketimpangan antar daerah yang tinggi maka pembangunan tersebut akan mengalami masalah. Masalah tersebut tidak hanya berasal dari aspek ekonomi, juga dari aspek non ekonomi seperti sosial, politik, dan keamanan. Pada gilirannya, masalah-masalah tersebut akan mengganggu pembangunan ekonomi suatu negara.

Pada hakekatnya, Indonesia sudah memasukkan prinsip desentralisasi dalam perencanaan pembangunannya. Hal tersebut terlihat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pembangunan ekonomi Indonesia sejak awal 1970-an hingga tiga dekade cenderung dilaksanakan secara terpusat. Pemerintah Pusat mengendalikan penuh keputusan pembangunan, dan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana. Oleh karenanya, ketika ketidakmerataan antar daerah mengemuka, maka itu dipahami sebagai masalah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tuntutan atas pengaturan kembali hubungan Pusat dan Daerah semakin kuat ketika masa kepresidenan Orde Baru (Suharto) berakhir. (Nazara: 2010)

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya kedua UU tersebut direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberlakuan UU tersebut memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintahan daerah untuk mengelola pembangunan di daerahnya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, Indonesia terdiri dari 26 provinsi (setelah Timor-Timur keluar), namun setelah pemberlakuan otonomi daerah menjadi 30 provinsi (tahun 2000) dan, terakhir, 33 provinsi (sejak tahun 2005). Konsekuensinya, jumlah Kabupaten dan kecamatan meningkat. Jumlah kabupaten meningkat dari 268 kabupaten pada tahun 2000 menjadi 339 kabupaten pada tahun 2009; sedangkan jumlah kecamatan meningkat dari 4.049 kecamatan (tahun 2000) menjadi 6.651 kecamatan (tahun 2009).

Dapat dibayangkan seberapa besar uang yang sudah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pendirian lembaga pemerintahan daerah yang baru tersebut, yang sebenarnya belum langsung menyentuh sektor produksi dan peningkatan daya saing daerah tersebut.

Krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi -13,1 % pada tahun 1998 dan 0,8 % pada tahun 1999. Selanjutnya, pada kurun 2000-2009, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 5,3 % per tahun. Pertumbuhan tersebut, apabila merujuk pada data World Bank, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang sekitar 2,9 % per tahun dan negara maju yang sekitar 2,0 % per tahun. Sehubungan dengan itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah kinerja ekonomi nasional yang relatif baik tersebut disertai dengan perkembangan yang relatif merata pada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Mengingat, sejak tahun 2005, Indonesia terdiri dari 33 provinsi serta data PDRB terakhir saat ini adalah tahun 2009, maka jangka waktu penelitian yang dipilih adalah tahun 2005 hingga tahun 2009. Dalam kurun waktu tersebut akan dilihat posisi provinsi-provinsi di Indonesia menurut PDRB dan PDRB per kapitanya serta pertumbuhan ekonomi provinsi masing-masing. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2005-2009 disertai dengan pola pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang cenderung mengalami konvergensi (*convergence*) atau tidak. Apabila pola pertumbuhannya bersifat konvergen, maka daerah-daerah yang PDRB-nya relatif rendah dapat mengejar daerah-daerah yang PDRB-nya relatif tinggi dan disparitas pertumbuhan antar daerah dapat berpeluang (bukan otomatis) menjadi berkurang karena daerah-daerah yang produk domestik regional bruto per kapita (PDRB/kapita)-nya relatif rendah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada daerah-daerah yang PDRB/kapita-nya relatif tinggi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang, maka perumusan masalah adalah:

1. Daerah-daerah mana saja di Indonesia dalam periode 2005 – 2009 yang masuk kelompok daerah yang memiliki PDRB per kapita di atas dan di bawah PDRB per kapita nasional?
2. Daerah-daerah mana saja di Indonesia dalam periode 2005 – 2009 yang masuk kelompok daerah yang memiliki pertumbuhan PDRB per kapita di atas dan di bawah PDRB per kapita nasional?
3. Apakah pola pertumbuhan PDRB per kapita antar daerah di Indonesia dalam periode 2005 – 2009 cenderung konvergen?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pertumbuhan

Salah satu indikator utama dalam menilai kondisi ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada hakekatnya, PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam satu periode. Data PDRB dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah persentase perubahan PDRB dalam satu periode.

Untuk menilai kesejahteraan suatu negara biasanya digunakan indikator PDB per kapita, maka untuk menilai kesejahteraan suatu daerah digunakan indikator PDRB per kapita. Selanjutnya, untuk menilai kinerja kesejahteraan suatu negara biasanya digunakan pertumbuhan PDB per kapita; sedangkan kinerja kesejahteraan suatu daerah dapat dinilai dengan menggunakan pertumbuhan PDRB per kapita. Membandingkan antara PDRB per kapita dan pertumbuhan PDRB per kapita suatu daerah dengan PDB per kapita dan pertumbuhan PDB per kapita dapat digunakan untuk menilai apakah kinerja kesejahteraan suatu daerah lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari pemerintah pusat atau rata-rata nasional.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kesejahteraan suatu negara dan daerah berhubungan dengan PDB per kapita dan PDRB per kapita, maka terdapat hubungan positif antara kesejahteraan suatu negara atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi negara atau daerah tersebut. Meskipun demikian, penelitian ini menyadari bahwa penggunaan PDB per kapita dan PDRB per kapita sebagai pengukur kesejahteraan suatu negara dan daerah bersifat kasar dan mengandung masalah karena masih banyak aspek ekonomi kesejahteraan yang belum dimasukkan dalam PDB dan PDRB (Weil (2009) dan Stiglitz, dkk (2011)).

Kaldor, sebagaimana dikutip oleh Barro dan Martin (1995), memberi sejumlah *stylized facts* yang ia anggap mencerminkan proses pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Pertumbuhan *output* per kapita, yang tidak cenderung menurun.
2. Pertumbuhan kapital fisik per pekerja
3. *Rate of return* kapital yang cenderung konstan.
4. Rasio kapital fisik terhadap *output* cenderung konstan.
5. Kontribusi tenaga kerja dan kapital fisik terhadap pendapatan nasional cenderung konstan.
6. Tingkat pertumbuhan *output* per pekerja yang secara substansi berbeda antar negara

Sehubungan dengan proses pertumbuhan ekonomi pada nomor enam, Kuznets, sebagaimana dikutip oleh Barro & Martin (1995), menjelaskan karakteristik pertumbuhan ekonomi modern.

Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah pembangunan ekonomi yang disertai dengan tingkat transformasi struktural yang cepat, yang meliputi pergeseran kontribusi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Pergeseran kontribusi sektor produksi tersebut juga disertai proses urbanisasi, pergeseran dari status pekerja rumah tangga (di rumah) ke status pekerja, peningkatan peran pendidikan formal, kenaikan peranan perdagangan luar negeri dan kemajuan teknologi yang berimplikasi pada penurunan ketergantungan pada sumber daya alam. Di balik itu, peran pemerintah meningkat dalam aktivitas ekonomi serta menyediakan infrastruktur.

Sebagaimana pernyataan Kuznets tersebut, proses pembangunan biasanya disertai dengan transformasi atau pergeseran struktur produksi. Transformasi tersebut juga ditentukan oleh potensi yang bisa dijadikan sebagai basis pertumbuhan suatu daerah. Dalam analisis regional, basis pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat melalui indikator *Location Quotient* atau LQ (Rustiadi dkk (2009) dan Daryanto & Hafizrianda (2010)). LQ merupakan indikator sederhana untuk melihat potensi suatu sektor dengan cara membandingkan peran suatu sektor dalam suatu daerah dengan peran sektor tersebut dalam daerah di tingkat atasnya atau daerah yang dijadikan sebagai referensi. Apabila $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi penggerak utama daerah untuk memproduksi dan mengeksport produknya ke luar daerah dan, bahkan, ke luar negeri. Apabila $LQ = 1$ dan $LQ < 1$, maka sektor tersebut bukan merupakan basis penggerak utama daerah tersebut. Apabila $LQ < 1$, maka sektor tersebut lebih banyak mengimpor dari daerah lain dan/atau luar negeri. Formula LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ir} = \frac{X_{ir}/X_r}{X_{in}/X_n} \dots\dots\dots(2.1)$$

Ketrangan:

X_{ir} = nilai tambah sektor i di daerah r

X_r = total nilai tambah daerah r

X_{in} = nilai tambah sektor i nasional

X_n = total nilai tambah nasional

Nazara (2010) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya didominasi oleh beberapa daerah saja. Sebagai contoh dikemukakan bahwa 39% PDB Thailand berada di sekitar Bangkok, dan sekitar 60% PDB Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan pendapatan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Ketimpangan pendapatan berhubungan dengan disparitas dalam distribusi pendapatan, yakni kesenjangan (*gap*) antara yang kaya dan yang miskin di suatu negara. Shin (2008) mengemukakan bahwa tidak mungkin untuk menyatakan dengan mudah mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Dalam awal tulisannya tersebut, ia

mengumpulkan berbagai literatur yang membahas mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan

Hubungan	Penulis
Negatif	Murphy dkk (1989), Perotti (1993), Alesina dan Rodrik (1994), Persson dan Tabellini (1994), Perotti (1996), Alesina dan Perotti (1996), Acemoglu (1997), Helpman (2004), Tachibanaki (2005), Sukiassyan (2007)
Positif	Okun (1975), Bourguignon (1990), Benabon (1996), Li dan Zou (1998), Aghion dan Howitt (1998), Forbes (2000)
U terbalik	Chen (2003)
Tidak unit atau tidak konklusif	Amos (1988), Barro (2000), Banerjee dan Duflo (2003), Weil (2005), Shin dkk (2009)

Sumber: Shin (2008)

Pada tahun 1955, Kuznets, sebagaimana dikutip dalam Shin (2008) dan Weil (2009), membuat hipotesis mengenai hubungan antara tahap pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada tahap awal pembangunan, kenaikan pendapatan per kapita disertai dengan kenaikan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, pada tahap pembangunan yang sudah mapan, peningkatan pendapatan per kapita disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Hipotesis Kuznets tersebut apabila dibuat gambar, dengan sumbu horizontal merupakan pendapatan per kapita dan sumbu vertikal merupakan tingkat ketimpangan pendapatan yang didekati dengan koefisien Gini (*Gini coefficient*), maka gambarnya akan berbentuk kurva U terbalik (*inverted U-shaped*). Kurva tersebut dikenal sebagai kurva Kuznets (*Kuznets curve*).

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah. Williamson (Rustiadi dkk (2009) dan Daryanto & Hafizrianda (2010)) mengembangkan indeks kesenjangan wilayah yang diformulasikan sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 P_i}}{\bar{Y}} \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan:

V_w = Indeks kesenjangan Williamson

Y_i = PDRB per kapita daerah i

\bar{Y} = rata-rata PDRB per kapita seluruh daerah

$P_i = f_i/n$, di mana f_i adalah jumlah penduduk daerah i dan n adalah total penduduk seluruh daerah

Pengukuran disparitas tersebut didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar wilayah yang berupa besaran PDRB. Kriteria pengukurannya adalah jika indeks = 0, berarti tidak terdapat kesenjangan ekonomi antar daerah; semakin besar nilai indeks, semakin besar tingkat perbedaan ekonomi antarwilayah dengan rata-ratanya; semakin kecil nilai indeks, semakin menunjukkan pemerataan antarwilayah yang lebih baik.

B. Konvergensi

Penelitian teoritis mengenai konvergensi telah dimulai sejak paper Solow dan Swan pada tahun 1956 (Barro & Martin (1995), Roemer (1996), Perkins, et.al (2001), Chi (2005), Potipiti (2009), Weil (2009), dan Dowling & Velenzuela (2010)). Bagi ekonom yang mempelajari pertumbuhan ekonomi suatu negara, penelitian ini sangat menarik karena mencoba menjawab mengenai apakah mungkin bagi negara-negara miskin untuk bisa mengejar negara-negara kaya sehingga, pada gilirannya, disparitas perekonomian di antara kedua jenis negara tersebut menjadi lebih sempit atau cenderung menyatu.

Weil (2009) menilai bahwa meskipun model Solow kurang mampu menjelaskan latar belakang mengapa terdapat perbedaan yang besar dalam tingkat pertumbuhan antar negara di dunia serta prospek negara yang sudah mencapai *steady state*, namun model tersebut masih mampu menjelaskan serta memprediksi tingkat pertumbuhan relatif (*relative growth rates*) – yakni, mengapa beberapa negara tumbuh lebih cepat daripada negara lainnya ketika negara-negara tersebut belum mencapai *steady state*-nya.

Penelitian empiris mengenai konvergensi mulai muncul pada tahun 1986. Baumol merupakan orang pertama yang menguji secara empiris hipotesis konvergensi. Baumol menggunakan regresi sederhana (*simple regression*) berdasarkan data 16 negara industri yang dikumpulkan oleh Maddison untuk menguji apakah terdapat korelasi negatif antara tingkat pertumbuhan dan tingkat pendapatan awal negara-negara tersebut. Ia menemukan terjadi konvergensi antar kelompok Negara-negara industri tersebut. (Roemer (1996) dan Potipiti (2009))

Adapun bentuk persamaan regresi yang dibuat Baumol (Roemer (1996)):

$$\ln [(Y/N)_{i,1979}] - \ln [(Y/N)_{i,1870}] = a + b \ln[(Y/N)_{i,1870}] + \varepsilon_i \dots \dots \dots (2.3)$$

Keterangan:

- $\ln(Y/N)$ adalah log pendapatan per kapita
- ε adalah *error term*

- i adalah indeks Negara

Menurut persamaan (2.3), konvergensi terjadi apabila b bertanda negative ($b < 0$): Negara-negara yang pendapatan awalnya lebih tinggi akan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah daripada Negara-negara yang pendapatan awalnya lebih rendah. Nilai $b = -1$ berhubungan dengan *perfect convergence*, sedangkan nilai $b = 0$ berarti bahwa pertumbuhan tidak berhubungan dengan pendapatan awal dan tidak ada *convergence*.

Hasil pengujian Baumol adalah:

$$\ln [(Y/N)_{i,1979}] - \ln [(Y/N)_{i,1870}] = 8.457 - 0.995 \ln[(Y/N)_{i,1870}] \dots\dots\dots(2.4)$$

(0.094)

$$R^2 = 0.87 \quad \text{s.e.e} = 0.15$$

Angka dalam kurung, 0.094, merupakan *standard error of the regression coefficient*.

Hasil regresi pada persamaan 2.4 menunjukkan hampir terjadi *perfect convergence* karena estimasi b hampir sama dengan -1.

Hingga sekarang penelitian Baumol tetap menarik perhatian dalam membahas pertumbuhan ekonomi untuk melihat apakah Negara miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada Negara kaya. Meskipun demikian, sebagaimana dikutip oleh Roemer (1996), Bradford De Long pada tahun 1988 mengkritisi hasil penelitian Baumol tersebut. De Long mengkritik pemilihan sampel yang diambil dan pengukuran datanya terutama yang berasal dari tahun 1870.

Sejak itu, berbagai penelitian empiris mengenai konvergensi mulai berkembang, tidak hanya diaplikasikan untuk menilai pola perkembangan antar negara di tingkat internasional juga antar daerah di tingkat nasional. Hasilnya, terjadi perdebatan berkenaan dengan penilaian apakah pertumbuhan ekonomi internasional dan atau pertumbuhan ekonomi regional suatu negara mengalami konvergensi atau tidak dalam kurun waktu tertentu (Chi, 2005).

Secara garis besar, terdapat dua konsep konvergensi yang muncul dalam diskusi pertumbuhan ekonomi lintas negara atau daerah (Barro & Martin (1995)):

1. Konvergensi terjadi apabila Negara yang miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada Negara yang kaya sehingga Negara miskin cenderung mengejar Negara kaya dalam tingkat pendapatan atau produk perkapita-nya. Ini berhubungan dengan konsep “ β convergence”.
2. Konvergensi terjadi jika dispersi – misalnya, yang diukur oleh deviasi standar logaritma pendapatan atau produk per kapita lintas kelompok Negara atau daerah – cenderung turun. Ini disebut sebagai proses “ σ convergence” – yang memusatkan perhatian pada dispersi *cross sectional*.

Konsep β convergence yang dibuat oleh Baumol saat ini lebih dikenal sebagai *absolute β convergence*. Pada dasarnya, *absolute β convergence* menggambarkan tendensi daerah miskin yang mengejar pertumbuhan ekonomi daerah kaya (Villaverde dan Maza, 2009). Selain bentuk persamaan yang diperkenalkan Baumol, persamaan *absolute β convergence* juga sering ditemui dalam berbagai tulisan berbentuk sebagai berikut:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \log\left(\frac{y_{iT}}{y_{i0}}\right) = c + \beta \log(y_{i0}) + \mu_i \dots\dots\dots(2.5)$$

Nilai c adalah konstanta, $\beta = - (1 - e^{-bT}/T)$ adalah suatu parameter yang mengindikasikan hubungan antara pertumbuhan dan pendapatan awal, b adalah kecepatan konvergensi (*speed of convergence*), y_i berhubungan dengan pendapatan per kapita daerah i , T merupakan periode sampel, dan μ adalah *error term*. Apabila koefisien regresi pada pendapatan per kapita awal (β) bertanda negative, berarti perekonomian negara atau daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada negara atau daerah kaya, maka dikatakan terjadi *absolute β convergence*.

Dalam perkembangannya, β convergence dibedakan menjadi *absolute (unconditional) β convergence* dan *conditional β convergence* (Villaverde dan Maza, 2009). Perbedaan antara *absolute (unconditional) β convergence*, yang selanjutnya disingkat *absolute β convergence*, dan *conditional β convergence* berhubungan dengan parameter yang menentukan pendapatan dalam *steady-state*, yakni, situasi di mana berbagai kuantitas tumbuh pada tingkat yang konstan. *Absolute β convergence* berdasarkan pada asumsi bahwa yang berbeda hanya pendapatan per kapita tingkat awal, sedangkan *conditional β convergence* selain mempertimbangkan pendapatan per kapita tingkat awal juga faktor lain yang dianggap memengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti teknologi, infrastruktur, kecenderungan menabung, bauran industri, dan lain-lain. Persamaan *conditional β convergence* diberikan pada persamaan 2.6:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \log\left(\frac{y_{iT}}{y_{i0}}\right) = c + \beta \log(y_{i0}) + \gamma X'_i + \mu_i \dots\dots\dots(2.6)$$

Keterangan:

X'_i merupakan suatu *vector of conditioning variables*.

Konvergensi selain berhubungan dengan β convergence juga berhubungan dengan σ convergence. σ convergence digunakan untuk melihat apakah pola pertumbuhan dalam periode waktu tertentu disertai dengan penurunan dispersi pendapatan per kapita antar negara atau daerah. Sebagai konsep, β convergence dan σ convergence digunakan bersama dalam literatur yang berhubungan dengan konvergensi. Meskipun berbagai indikator ketimpangan dapat

dianggap sebagai suatu pengukuran σ *convergence* (atau *divergence*), beberapa tulisan biasanya menggunakan indikator seperti *variance* (*standard deviation*) atau *coefficient variation*. (Villaverde & Maza (2009)). *Coefficient variation* (σ) diberikan pada persamaan 2.7:

$$\sigma = \frac{s}{\bar{y}} \dots\dots\dots(2.7)$$

Keterangan:

- s adalah *standard deviation*
- \bar{y} adalah rata-rata pendapatan per kapita.

Perkins dan kawan-kawan (2001) meneliti hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita awal tahun untuk 124 negara pada periode 1965 – 1997 dalam bentuk suatu gambar. Penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan antara kedua variabel tersebut. Gambarnya tidak memberi pola yang jelas. Beberapa Negara miskin telah tumbuh dengan cepat, namun Negara miskin lainnya tumbuh sangat rendah, bahkan negatif. Hal yang sama berlaku pada Negara-negara berpendapatan menengah. Di lain pihak, kebanyakan Negara-negara kaya mengalami pertumbuhan yang relatif rendah, sebagaimana yang telah diperkirakan. Hal ini memberi kesimpulan, yakni tidak ada tendensi umum bahwa Negara-negara miskin memimpin pertumbuhan ekonomi dunia. Jika pun ada, hal yang sebaliknya yang terjadi.

Dowling dan Valenzuela (2010) mengungkapkan bahwa hipotesis tersebut memperoleh sedikit dukungan ketika diuji dengan data dari berbagai Negara. Mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan untuk Negara-negara sedang berkembang di Asia dalam kurun waktu 1975-2000 tidak sepenuhnya tergantung pada kondisi awal perekonomian. Dengan kata lain, tidak ada alasan untuk percaya bahwa pendapatan Negara-negara sedang berkembang di Asia akan mengalami konvergensi di masa yang akan datang. Namun, mereka juga menemukan bahwa hipotesis konvergensi tampaknya berlaku pada Negara-negara yang lebih homogen, khususnya pada Negara-negara OECD setelah tahun 1950. Apabila total Negara-negara OECD dibagi dua, negara-negara yang lebih miskin tumbuh lebih dari 1 persen di atas pertumbuhan Negara-negara yang lebih kaya. Apabila total Negara-negara OECD dibagi empat, Negara-negara yang lebih miskin seperempat paling bawah tumbuh lebih dari 2 persen di atas Negara-negara yang seperempat paling atas. Lebih lanjut, dispersi pendapatan turun secara dramatis. Jepang merupakan contoh terbaik yang menunjukkan kemampuannya dalam mengejar pendapatan per kapita Negara seperti Amerika Serikat. Selain itu, negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara cenderung mengalami konvergensi terhadap negara-negara industri. Dalam kurun waktu 1960-1990, seluruh NIEs (*Newly Industrialized Economies*) tumbuh lebih tinggi di atas 3 persen dari rata-rata pertumbuhan Negara-negara OECD. Pada kasus antar daerah di dalam negara, tingkat konvergensi tampak sangat rendah. Misalnya, di Amerika Serikat, Amerika bagian selatan masih

lebih miskin daripada bagian Negara lainnya, baik dalam pendapatan per kapita maupun kapital per kapita.

Chi (2005) menggunakan data 30 provinsi di China selama tahun 1978 hingga 2000 meneliti konvergensi di China dengan membagi provinsi-provinsi menjadi tiga kelompok, yakni daerah-daerah yang sudah maju, daerah yang baru berkembang, dan daerah yang masih tertinggal. Ia memperkenalkan *conditional β -convergence hypothesis*, *absolute β -convergence hypothesis* dan *σ -convergence hypothesis*. Penelitiannya sesuai dengan *conditional β -convergence hypothesis*, namun bertentangan dengan *absolute β -convergence hypothesis* dan *σ -convergence hypothesis*. Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa kebijakan dengan karakter yang heterogen secara regional mengindikasikan cukup berpengaruh pada pola pertumbuhan regional. Penemuan tersebut berbeda dengan prediksi Barro dan Sala-i-Martin yang menganggap bahwa daerah-daerah yang relatif homogen cenderung mendukung ketiga tipe konvergensi.

Kesimpulan mengenai pola pertumbuhan suatu negara atau daerah bersifat konvergen atau divergen atau, bahkan, tidak memiliki pola yang jelas, sangat bermanfaat untuk membantu dalam memprediksi arah perkembangan ekonomi antar negara atau antar daerah. Pada gilirannya, kesimpulan tersebut juga dapat digunakan untuk memprediksi apakah disparitas yang terjadi dapat menurun atau tidak. Di semua negara, terlepas dari ukuran dan tingkat pembangunannya, disparitas pembangunan merupakan masalah pembangunan antar wilayah karena berpotensi dapat menimbulkan masalah-masalah social, keamanan, dan politik. Oleh karenanya, kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Ketimpangan pembangunan inter-regional selain menyebabkan kapasitas pembangunan regional yang sub-optimal, pada gilirannya juga menihilkan potensi pertumbuhan pembangunan makro karena interaksi pembangunan inter-regional tidak sinergis (Rustiadi: 2009).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

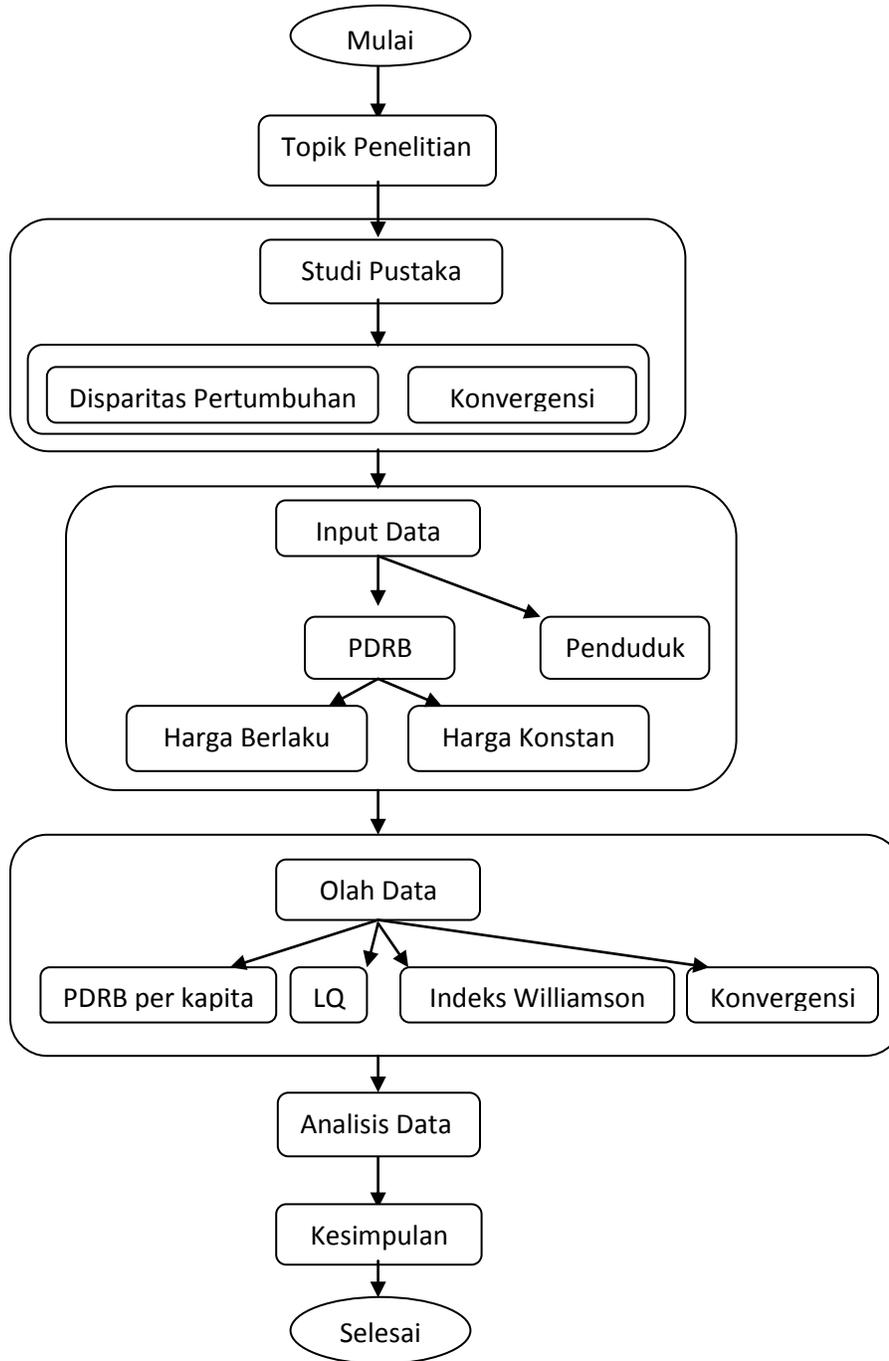
1. Memperoleh gambaran mengenai perkembangan ekonomi antar daerah di Indonesia
2. Memperoleh kesimpulan apakah pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia cenderung mengalami konvergensi atau tidak.

B. Manfaat Penelitian

1. Memberi gambaran mengenai perkembangan ekonomi antar daerah di Indonesia, khususnya selama periode 2005-2009. Penelitian ini akan menjelaskan daerah mana saja yang perkembangan ekonominya di atas, sama, atau di bawah perkembangan ekonomi nasional.
2. Memperoleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik PDRB total (migas dan tanpa migas) maupun PDRB tanpa migas, yang biasanya digunakan sebagai indikator ekonomi suatu daerah. Data ini akan memberi penjelasan apakah perbedaan data tersebut (total dan tanpa migas), mempengaruhi kesimpulan mengenai perkembangan ekonomi antar daerah.
3. Dengan memperhatikan perbedaan perkembangan ekonomi daerah-daerah di Indonesia, penelitian ini selanjutnya akan melihat apakah pola pertumbuhannya cenderung bersifat konvergen atau tidak.
4. Hasil penelitian ini, pada gilirannya, akan memberi kesimpulan apakah arah pembangunan daerah di Indonesia cenderung mengurangi ketimpangan atau justru cenderung semakin meningkatkan ketimpangan. Kecenderungan ini juga dapat digunakan sebagai evaluasi atas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang sudah dimulai tahun 2000.
5. Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia, khususnya, yang berhubungan dengan topik Pembangunan Daerah.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Diagram Alir Penelitian



Gambar 4.1
Diagram Alir Penelitian

Data:

Data yang digunakan adalah data sekunder, seperti PDRB dan PDRB per kapita untuk 33 provinsi tahun 2005 – 2009, baik total (migas dan tanpa migas) maupun tanpa migas. Data tersebut diambil dari buku “Produk Domestik Regional Bruto”, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (2009 dan 2011).

Pertimbangan periode penelitian yang dicakup adalah tahun 2005 hingga 2009 adalah, sebagai berikut:

1. Saat ini, Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Data PDRB 33 provinsi baru tersedia pada tahun 2005.
2. Data PDRB paling akhir ketika proposal penelitian ini diajukan adalah tahun 2009.

B. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Teori yang digunakan adalah:

1. Teori basis ekonomi. Teori ini beranggapan bahwa ekspor daerah merupakan faktor penentu dalam pembangunan ekonomi. Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah dapat digunakan metode *location quotient* (LQ).
2. Indeks Williamson, yang digunakan untuk mengetahui disparitas antar wilayah.
3. Teori konvergensi (*convergence*) untuk mengetahui apakah pertumbuhan daerah yang miskin dapat mengejar pertumbuhan daerah yang kaya.

Model atau persamaan yang digunakan:

1. *Location Quotient* (LQ)

Untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi suatu daerah dapat digunakan metode *Location Quotient* (LQ), yang merupakan rasio relatif antara proporsi aktivitas suatu sektor ekonomi suatu daerah terhadap proporsi aktivitas suatu sektor ekonomi total daerah. Formula LQ adalah:

$$LQ_{ir} = \frac{X_{ir}/X_r}{X_{in}/X_n} \dots\dots\dots(4.1)$$

Keterangan:

X_{ir} = nilai tambah sektor i di daerah r

X_r = total nilai tambah daerah r

X_{in} = nilai tambah sektor i nasional

X_n = total nilai tambah nasional

Suatu daerah dianggap memiliki basis aktivitas ekonomi pada sektor yang memiliki nilai LQ di atas 1.

2. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah. Williamson mengembangkan indeks kesenjangan wilayah yang diformulasikan sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 P_i}}{\bar{Y}} \dots\dots\dots(4.2)$$

Keterangan:

V_w = Indeks kesenjangan Williamson

Y_i = PDRB per kapita daerah i

\bar{Y} = rata-rata PDRB per kapita seluruh daerah

P_i = f_i/n, di mana f_i adalah jumlah penduduk daerah i dan n adalah total penduduk seluruh daerah

Pengukuran didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar wilayah yang berupa besaran PDRB. Kriteria pengukurannya: Indeks = 0, berarti tidak terdapat kesenjangan ekonomi antar daerah; semakin besar nilai indeks, semakin besar tingkat perbedaan ekonomi antarwilayah dengan rata-ratanya; semakin kecil nilai indeks, semakin menunjukkan pemerataan antarwilayah yang lebih baik.

3. *Convergence*

Perhitungan konsep konvergensi (*convergence*) yang digunakan adalah *absolute β convergence*. Persamaan *absolute β convergence* diberikan oleh:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \log\left(\frac{y_{iT}}{y_{i0}}\right) = c + \beta \log(y_{i0}) + \mu_i \dots\dots\dots(4.3)$$

Keterangan: **c** adalah konstanta, $\beta = - (1 - e^{-bT}/T)$ adalah suatu parameter yang mengindikasikan hubungan antara pertumbuhan dan pendapatan awal, menjadi **b** kecepatan konvergensi (*speed of convergence*), **T** merupakan periode sampel, **y_i** berhubungan dengan pendapatan per kapita daerah **i**, **y_{i0}** berhubungan dengan pendapatan per kapita daerah **i** pada tahun awal, **y_{iT}** berhubungan dengan pendapatan per kapita daerah **i** pada tahun akhir, dan **μ** adalah *error term*. Ketika koefisien regresi pada pendapatan per kapita awal (**β**) bertanda negatif, berarti bahwa perekonomian daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya. Kondisi ini menunjukkan terjadi *absolute β convergence*.

Untuk melihat apakah β selain sesuai dengan konsep konvergensi juga signifikan secara statistik, maka dapat diuji dengan uji t pada tingkat kepercayaan 95%. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- Hipotesis nol: $H_0 : \beta \geq 0$
- Hipotesis alternatif: $H_1: \beta < 0$

Konvergensi selain berhubungan dengan β *convergence* juga berhubungan dengan σ *convergence*. σ *convergence* digunakan untuk melihat apakah pola pertumbuhan dalam periode waktu tertentu disertai dengan penurunan dispersi pendapatan per kapita antar negara atau daerah. Sebagai konsep, β *convergence* dan σ *convergence* digunakan bersama dalam literatur yang berhubungan dengan konvergensi. Meskipun berbagai indikator ketimpangan dapat dianggap sebagai suatu pengukuran σ *convergence* (atau *divergence*), beberapa tulisan biasanya menggunakan indikator seperti variance (*standard deviation*) atau *coefficient variation*. (Villaverde & Maza (2009)). *Coefficient variation* (σ) diberikan oleh:

$$\sigma = s/\bar{y} \dots\dots\dots(4.4)$$

Keterangan:

- s adalah *standard deviation*
- \bar{y} adalah rata-rata pendapatan per kapita.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi regional dihitung berdasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut data PDRB, baik PDRB total (Migas + tanpa migas) dan PDRB tanpa migas, kontributor terbesar bagi nilai tambah produksi Indonesia tahun 2005 – 2009 berasal dari provinsi-provinsi berikut (menurut urutan): DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Keenam provinsi tersebut menyumbang di atas 65 persen nilai tambah produksi nasional. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi, Tahun 2005 - 2009
(dalam %)

NO	PROVINSI	PDRB Total (Migas + Tanpa Migas)					PDRB Tanpa Migas				
		2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2,15	2,07	1,92	1,72	1,55	1,46	1,49	1,50	1,44	1,42
2	Sumatera Utara	5,20	5,25	5,31	5,35	5,37	5,67	5,69	5,71	5,73	5,73
3	Sumatera Barat	1,73	1,74	1,75	1,76	1,76	1,89	1,90	1,90	1,90	1,88
4	Riau	4,69	4,69	4,59	4,59	4,51	2,18	2,24	2,27	2,32	2,34
5	Kepulauan Riau	1,80	1,82	1,85	1,87	1,85	1,86	1,88	1,90	1,92	1,89
6	Jambi	0,75	0,75	0,76	0,77	0,78	0,72	0,74	0,74	0,75	0,76
7	Sumatera Selatan	2,94	2,94	2,94	2,93	2,91	2,36	2,39	2,43	2,43	2,43
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52
9	Bengkulu	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40
10	Lampung	1,74	1,74	1,74	1,73	1,74	1,87	1,86	1,86	1,85	1,85
11	DKI Jakarta	17,47	17,59	17,72	17,83	17,89	19,12	19,14	19,13	19,18	19,14
12	Jawa Barat	14,37	14,48	14,59	14,62	14,57	15,20	15,27	15,31	15,32	15,17
13	Banten	3,44	3,45	3,46	3,47	3,47	3,78	3,76	3,75	3,74	3,72
14	Jawa Tengah	8,46	8,48	8,47	8,46	8,46	8,68	8,63	8,59	8,54	8,54
15	DI Yogyakarta	1,00	0,99	0,97	0,97	0,97	1,10	1,08	1,05	1,04	1,04
16	Jawa Timur	15,17	15,26	15,32	15,37	15,42	16,62	16,61	16,53	16,52	16,48
17	Bali	1,25	1,25	1,25	1,25	1,26	1,37	1,36	1,35	1,35	1,36
18	Nusa Tenggara Barat	0,90	0,88	0,87	0,85	0,88	0,99	0,96	0,94	0,91	0,95
19	Nusa Tenggara Timur	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62
20	Kalimantan Barat	1,39	1,39	1,40	1,40	1,40	1,53	1,52	1,51	1,50	1,50
21	Kalimantan Tengah	0,83	0,84	0,84	0,84	0,85	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
22	Kalimantan Selatan	1,38	1,38	1,38	1,39	1,39	1,48	1,47	1,47	1,47	1,47
23	Kalimantan Timur	5,56	5,43	5,24	5,20	5,08	2,76	2,94	3,04	3,04	3,08
24	Sulawesi Utara	0,75	0,76	0,76	0,78	0,80	0,83	0,83	0,82	0,84	0,86
25	Gorontalo	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
26	Sulawesi Tengah	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80
27	Sulawesi Selatan	2,15	2,19	2,20	2,25	2,28	2,36	2,38	2,38	2,42	2,44
28	Sulawesi Barat	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21
29	Sulawesi Tenggara	0,47	0,49	0,50	0,50	0,52	0,52	0,53	0,54	0,54	0,56
30	Maluku	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
31	Maluku Utara	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15
32	Papua	1,31	1,04	1,02	0,96	1,10	1,44	1,13	1,11	1,04	1,18
33	Papua Barat	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28
	TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari data BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010

Catatan:

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

Memperhatikan tingkat pertumbuhannya, provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas tingkat pertumbuhan rata-rata nasional selama tahun 2005 hingga 2009 adalah DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Namun, apabila menggunakan data PDRB nonmigas, maka provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas tingkat pertumbuhan rata-rata nasional selama tahun 2005 hingga 2009 adalah Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Namun, perlu diketahui sebagai catatan, Sulawesi Barat hanya mencakup pertumbuhan tahun 2006 hingga 2009 karena data PDRB tahun 2004 belum ada sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2005 tidak dapat dihitung. Data tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Tingkat Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi, Tahun 2005 - 2009
(dalam %)

NO	PROVINSI	PDRB Total (Migas + Tanpa Migas)					PDRB Tanpa Migas				
		2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
1	Nanggroe Aceh Darussalam	(10,12)	1,56	(2,36)	(5,27)	(5,58)	1,22	7,70	7,23	1,88	3,92
2	Sumatera Utara	5,48	6,20	6,90	6,39	5,07	5,52	6,26	6,89	6,40	5,14
3	Sumatera Barat	5,73	6,14	6,34	6,36	4,16	5,73	6,14	6,34	6,36	4,16
4	Riau	5,41	5,15	3,41	5,65	2,90	8,54	8,66	8,25	8,06	6,44
5	Kepulauan Riau	6,57	6,78	7,01	6,65	3,51	7,08	7,23	7,55	7,22	3,65
6	Jambi	5,57	5,89	6,82	7,16	6,37	6,25	8,35	6,59	7,37	6,90
7	Sumatera Selatan	4,83	5,20	5,84	5,07	4,10	6,91	7,31	8,04	6,31	5,05
8	Kepulauan Bangka Belitung	3,47	3,98	4,54	4,49	3,53	4,60	4,80	5,37	4,82	3,77
9	Bengkulu	5,82	5,95	6,46	4,93	4,04	5,82	5,95	6,46	4,93	4,04
10	Lampung	4,02	4,98	5,94	5,26	5,07	4,61	5,31	6,14	5,33	5,33
11	DKI Jakarta	6,01	5,95	6,44	6,22	5,01	6,06	5,96	6,46	6,24	5,03
12	Jawa Barat	5,60	6,02	6,48	5,84	4,29	6,23	6,31	6,86	5,98	4,20
13	Banten	5,88	5,57	6,04	5,77	4,69	5,88	5,57	6,04	5,77	4,69
14	Jawa Tengah	5,35	5,33	5,59	5,46	4,71	5,00	5,32	5,97	5,33	5,20
15	DI Yogyakarta	4,73	3,69	4,31	5,02	4,39	4,73	3,69	4,31	5,02	4,39
16	Jawa Timur	5,84	5,80	6,11	5,94	5,01	5,84	5,79	6,04	5,90	4,94
17	Bali	5,56	5,28	5,92	5,97	5,33	5,56	5,28	5,92	5,97	5,33
18	Nusa Tenggara Barat	1,71	2,77	4,91	2,63	8,99	1,71	2,77	4,91	2,63	8,99
19	Nusa Tenggara Timur	3,46	5,08	5,15	4,81	4,24	3,46	5,08	5,15	4,81	4,24
20	Kalimantan Barat	4,69	5,23	6,02	5,42	4,76	4,69	5,23	6,02	5,42	4,76
21	Kalimantan Tengah	5,90	5,84	6,06	6,16	5,48	5,90	5,84	6,06	6,16	5,48
22	Kalimantan Selatan	5,06	4,98	6,01	6,23	5,01	5,29	5,05	6,08	6,37	5,11
23	Kalimantan Timur	3,17	2,85	1,84	4,79	2,32	8,07	12,62	10,23	6,12	6,36
24	Sulawesi Utara	4,90	5,72	6,47	7,56	7,85	4,93	5,69	6,47	7,56	7,83
25	Gorontalo	7,18	7,30	7,51	7,76	7,54	7,18	7,30	7,51	7,76	7,54
26	Sulawesi Tengah	7,57	7,82	7,99	7,76	7,66	7,19	7,22	7,25	7,41	7,67
27	Sulawesi Selatan	(2,27)	6,72	6,34	7,78	6,20	(2,29)	6,73	6,35	7,79	6,20
28	Sulawesi Barat	#DIV/0!	6,90	7,43	8,54	6,03	#DIV/0!	6,90	7,43	8,54	6,03
29	Sulawesi Tenggara	7,31	7,68	7,96	7,28	7,57	7,31	7,68	7,96	7,28	7,57
30	Maluku	5,07	5,55	5,62	4,23	5,43	5,08	5,57	5,74	4,23	5,44
31	Maluku Utara	5,10	5,49	6,01	5,98	6,01	5,10	5,49	6,01	5,98	6,01
32	Papua	36,40	(17,14)	4,34	(0,78)	20,34	36,40	(17,14)	4,34	(0,78)	20,34
33	Papua Barat	6,80	4,55	6,95	7,33	6,26	6,83	7,36	8,61	8,68	7,36
	T O T A L	5,37	5,19	5,67	5,61	4,65	6,18	5,87	6,55	5,95	5,21

Sumber: Diolah dari data BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010

Catatan:

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

Berdasarkan distribusi PDRB dan laju pertumbuhannya, serta mengasumsikan bahwa total PDRB seluruh provinsi di Indonesia sama dengan PDB Indonesia, maka dapat diperhitungkan kontribusi daerah masing-masing terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia (tabel 5.3). Dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2009 yang sekitar 5,29 persen, sekitar 70,01 persennya disumbang oleh provinsi-provinsi, antara lain, DKI Jakarta (19,73 persen), Jawa Timur (16,53 persen), Jawa Barat (15,46 persen), Jawa Tengah (8,43 persen), Sumatera Utara (6,14 persen), dan Riau (3,72 persen). Namun, berdasarkan data PDRB nonmigas, dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2009 yang sekitar 5,90 persen, sekitar 68,39 persennya disumbang oleh provinsi-provinsi, antara lain, DKI Jakarta (19,21 persen), Jawa Timur (15,90 persen), Jawa Barat (15,01 persen), Jawa Tengah (7,96 persen), Sumatera Utara (5,96 persen), dan Kalimantan Timur (4,35 persen).

Tabel 5.3.			
Kontribusi Tingkat Pertumbuhan PDRB			
Tahun 2005 - 2009			
(dalam persen)			
No	Provinsi	PDRB	PDRB
		Total	Tanpa Migas
1	Nanggroe Aceh Darussalam	(0,05)	0,07
2	Sumatera Utara	0,32	0,35
3	Sumatera Barat	0,10	0,11
4	Riau	0,20	0,18
5	Kepulauan Riau	0,11	0,12
6	Jambi	0,05	0,05
7	Sumatera Selatan	0,15	0,16
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,02	0,02
9	Bengkulu	0,02	0,02
10	Lampung	0,09	0,10
11	DKI Jakarta	1,04	1,13
12	Jawa Barat	0,82	0,89
13	Banten	0,19	0,21
14	Jawa Tengah	0,45	0,47
15	DI Yogyakarta	0,04	0,05
16	Jawa Timur	0,87	0,94
17	Bali	0,07	0,08
18	Nusa Tenggara Barat	0,04	0,05
19	Nusa Tenggara Timur	0,03	0,03
20	Kalimantan Barat	0,07	0,08
21	Kalimantan Tengah	0,05	0,05
22	Kalimantan Selatan	0,08	0,08
23	Kalimantan Timur	0,16	0,26
24	Sulawesi Utara	0,05	0,06
25	Gorontalo	0,01	0,01
26	Sulawesi Tengah	0,06	0,06
27	Sulawesi Selatan	0,15	0,16
28	Sulawesi Barat	0,01	0,01
29	Sulawesi Tenggara	0,04	0,04
30	Maluku	0,01	0,01
31	Maluku Utara	0,01	0,01
32	Papua	0,01	0,01
33	Papua Barat	0,02	0,02
	Total PDRB	5,29	5,90

Apabila memperhatikan basis lapangan usahanya, yang tercermin melalui indikator *location quotient* (LQ), maka provinsi-provinsi yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi tersebut relatif tidak memiliki basis lapangan usaha yang sama. DKI Jakarta, sebagai provinsi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, konstruksi; perdagangan, hotel & restoran; pengangkutan & komunikasi; keuangan, real estate & Jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Jawa Timur memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, tanaman bahan makanan; peternakan; penggalian; listrik, gas & air bersih; perdagangan, hotel & restoran; pengangkutan & komunikasi; dan jasa-jasa. Jawa Barat memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, tanaman bahan makanan; peternakan; industri non migas; listrik, gas & air bersih; dan perdagangan, hotel & restoran. Jawa Tengah memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, tanaman bahan makanan; peternakan; industri migas; perdagangan, hotel & restoran; dan jasa-jasa. Sumatera Utara memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, tanaman bahan makanan; tanaman perkebunan; peternakan; kehutanan; perikanan; pengangkutan & komunikasi; dan jasa-jasa. Kalimantan Timur memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, kehutanan; tambang migas; tambang non migas; dan industry migas. Data LQ selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

B. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Memperhatikan PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia (lampiran 4), provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah (menurut urutan) DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, dan Papua. Apabila menggunakan data PDRB nonmigas, maka provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah (menurut urutan) DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 5.4. memberikan gambaran posisi PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia selama kurun waktu 2005-2009 menurut jenis data PDRB. Jenis data PDRB, yang dipublikasi biasanya meliputi, antara lain, atas dasar harga berlaku; atas dasar harga berlaku tanpa migas; atas dasar harga konstan tahun 2000; dan atas dasar harga konstan tahun 2000 tanpa migas.

Tabel 5.4.
Posisi PDRB per Kapita Provinsi-provinsi di Indonesia
Tahun 2005-2009

No	Jenis Data PDRB	Provinsi	
		Di atas rata-rata	Di bawah rata-rata
1	Atas Dasar Harga Berlaku	Riau, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat
2	Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas	Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat
3	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	Riau, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara
4	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas	Sumatera Utara, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua	Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS PDRB Lapangan Usaha

Sebagai catatan, terdapat beberapa provinsi yang posisi PDRB per kapita yang kurang konsisten selama kurun waktu 2005-2009, yakni Aceh, Papua Barat, Kep. Bangka Belitung, dan Riau. PDRB per kapita Aceh, pada data PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000, menunjukkan bahwa PDRB per kapita Aceh di atas rata-rata nasional pada tahun 2005-2007 dan di bawah rata-rata nasional pada tahun 2008 dan 2009. PDRB per kapita Papua Barat, pada data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya di atas rata-rata nasional pada tahun 2005, 2008, dan 2009 dan di bawah rata-rata nasional pada tahun 2006 dan 2007. PDRB per kapita Kep. Bangka Belitung, pada data PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas, di atas rata-rata nasional pada tahun 2005-2008, dan di bawah rata-rata nasional pada tahun 2009. PDRB per kapita Riau, pada data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, menunjukkan kenaikan di atas rata-rata nasional pada tahun 2006-2009, dan di bawah rata-rata nasional pada tahun 2005.

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Namun, apabila menggunakan data PDRB nonmigas per kapita, maka provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2008 adalah Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

C. Disparitas PDRB Per Kapita

Hasil perhitungan indeks Williamson untuk provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa kenaikan PDB per kapita di Indonesia cenderung disertai dengan peningkatan ketimpangan PDRB per kapita. Provinsi-provinsi yang cenderung menunjukkan ketimpangan yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi lainnya terutama, antara lain, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah. Di antara semua provinsi tersebut, DKI Jakarta menunjukkan tingkat disparitas yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pusat, di Jakarta, sudah memberlakukan otonomi daerah namun orientasi pembangunannya masih cenderung di Jawa, khususnya provinsi DKI Jakarta.

Hasil perhitungan indeks Williamson selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.5.

TABEL 5.5
INDEKS WILIAMSON PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005-2009

NO	PROVINSI	INDEKS WILLIAMSON				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0,01	0,01	0,01	0,02	0,11
2	Sumatera Utara	0,03	0,03	0,03	0,03	0,22
3	Sumatera Barat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,12
4	Riau	0,15	0,05	0,14	0,14	0,29
5	Kepulauan Riau	0,15	0,15	0,15	0,15	0,22
6	Jambi	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07
7	Sumatera Selatan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,16
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
9	Bengkulu	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
10	Lampung	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
11	DKI Jakarta	0,62	0,65	0,65	0,67	0,88
12	Jawa Barat	0,10	0,11	0,10	0,10	0,34
13	Banten	0,04	0,05	0,05	0,05	0,17
14	Jawa Tengah	0,17	0,18	0,18	0,17	0,22
15	DI Yogyakarta	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08
16	Jawa Timur	0,05	0,06	0,05	0,04	0,38
17	Bali	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10
18	Nusa Tenggara Barat	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06
19	Nusa Tenggara Timur	0,10	0,11	0,11	0,11	0,04
20	Kalimantan Barat	0,04	0,04	0,04	0,04	0,10
21	Kalimantan Tengah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,09
22	Kalimantan Selatan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,11
23	Kalimantan Timur	0,35	0,34	0,32	0,32	0,43
24	Sulawesi Utara	0,03	0,03	0,03	0,02	0,08
25	Gorontalo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02
26	Sulawesi Tengah	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07
27	Sulawesi Selatan	0,07	0,08	0,08	0,07	0,12
28	Sulawesi Barat	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
29	Sulawesi Tenggara	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
30	Maluku	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02
31	Maluku Utara	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02
32	Papua	0,04	0,01	0,01	0,00	0,11
33	Papua Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06

Sumber: diolah dari data BPS

D. Pola Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Pola pertumbuhan PDRB per kapita dianalisis dengan pendekatan konvergensi. Awalnya, pengukuran konvergensi menggunakan model Baumol (Roemer (1996)) sebagai berikut:

$$\ln [(Y/N)_{i,t1}] - \ln [(Y/N)_{i,t0}] = a + b \ln[(Y/N)_{i,t0}] + \varepsilon_i \quad \dots\dots\dots (5.1)$$

Keterangan:

- $\ln(Y/N)$ adalah log pendapatan per kapita
- ε adalah *error term*
- i adalah indeks Negara

Model tersebut diterapkan pada berbagai jenis data PDRB :

Tabel 5.6.
Hasil Pengolahan Model Baumol Pada PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia
Tahun 2005 - 2009

No	Jenis Data	Konstanta	Koefisien b	t-test Koef b	Sig.
1	PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan	0,255 (0,078)	- 0,051 (0,021)	-2,478	0,019
2	PDRB per Kapita Tanpa Migas atas dasar Harga Konstan	0,155 (0,083)	- 0,023 (0,022)	-1,037	0,308
3	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku	0,382 (0,119)	- 0,044 (0,030)	-1,477	0,150
4	PDRB per Kapita Tanpa Migas atas dasar harga berlaku	0,304 (0,128)	- 0,022 (0,033)	-0,674	0,505

Keterangan: (...) = standard error

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

Berdasarkan perhitungan konvergensi pada keempat jenis data PDRB yang biasa digunakan dalam analisis PDRB (tabel 5.6.), terlihat bahwa meskipun koefisien **b** pada keempat data menunjukkan tanda negatif, namun koefisien **b** yang signifikan hanya terdapat pada jenis data PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Dengan demikian, data PDRB per kapita yang menunjukkan secara signifikan bahwa daerah-daerah yang PDRB per kapitanya relatif rendah pada tahun 2005 memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi daripada daerah-daerah yang PDRB per kapitanya relatif tinggi hanya pada data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 per kapita. Oleh karenanya, data ini digunakan untuk melihat konvergensi melalui persamaan *absolute β convergence* berikut:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \log\left(\frac{y_{iT}}{y_{i0}}\right) = c + \beta \log(y_{i0}) + \mu_i \quad \dots\dots\dots (5.2)$$

Perlu diketahui, selama kurun waktu 2005-2009, terdapat dua provinsi, yakni Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, mengalami tingkat pertumbuhan PDRB per kapita yang negatif. Oleh karenanya, persamaan *absolute β convergence* di atas dihitung dengan menggunakan data 33 provinsi dan 31 provinsi (menghilangkan Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua) untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasilnya. Berikut adalah hasil perhitungannya:

Tabel 5.7.
Hasil Pengolahan β convergence Pada PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia
Tahun 2005 - 2009

No	Jenis Data	Konstanta	Koefisien β	t-test koefisien β	Sig.
1	PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 untuk 33 provinsi	0,068 (0,022)	- 0,014 (0,006)	-2,442	0,020
2	PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 untuk 31 provinsi (2 provinsi yang tumbuh negatif dihilangkan)	0,053 (0,013)	- 0,009 (0,003)	-2,726	0,011

Keterangan: (...) = standard error

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

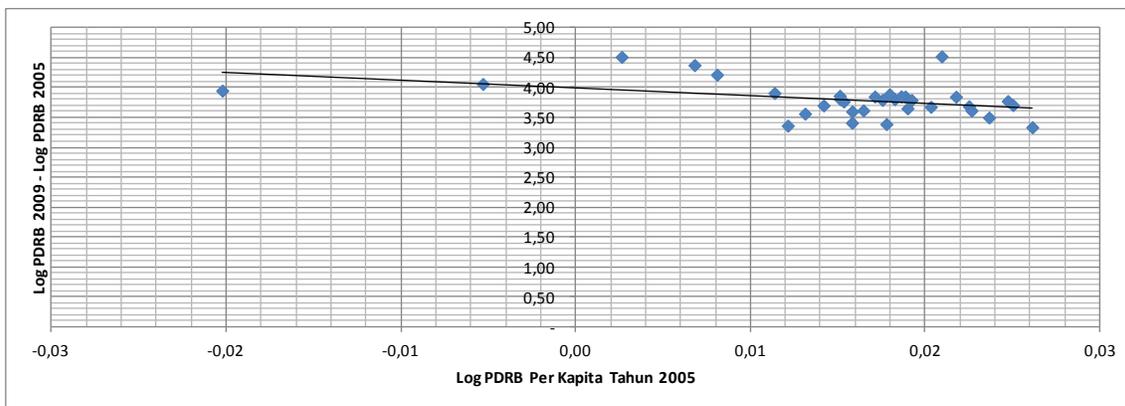
Dengan demikian, hasil perhitungan baik menggunakan seluruh provinsi di Indonesia (33 provinsi) maupun hanya 31 provinsi (mengeluarkan dua provinsi yang tumbuh negatif) menunjukkan hasil yang sama, yakni, pertumbuhan daerah-daerah yang PDRB per kapita-nya relatif rendah (di bawah rata-rata nasional) cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada daerah-daerah yang PDRB per kapitanya relatif tinggi (di atas rata-rata nasional).

Provinsi-provinsi yang PDRB per kapita tahun 2005 di bawah rata-rata nasional namun mengalami tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Di lain sisi, provinsi-provinsi yang PDRB per kapita tahun 2005 di atas rata-rata nasional, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional adalah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Papua.

Bahkan, Aceh dan Papua mengalami tingkat pertumbuhan negatif. Di luar daerah-daerah tersebut, Jakarta yang memiliki PDRB per kapita tertinggi di Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional, sedangkan daerah-daerah lainnya merupakan daerah yang PDRB per kapitanya di bawah rata-rata dan mengalami tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata nasional.

Hasil perhitungan β -convergence tabel 5.7. di atas dapat memberi informasi mengenai kecepatan konvergensi yang terjadi selama tahun 2005-2009. Kecepatan konvergensi per tahunnya adalah sekitar 0,04 persen (persamaan 1) dan 0,03 persen (persamaan 2). Kecepatan konvergensi tersebut relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pertumbuhan daerah-daerah yang PDRB per kapitanya di bawah rata-rata nasional masih kurang cepat mengejar daerah-daerah yang PDRB per kapitanya di atas rata-rata nasional. Bahkan daerah-daerah yang PDRB per kapitanya di bawah rata-rata nasional seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, NTB, NTT, Kalimantan Barat, dan Maluku mengalami tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata nasional. Di lain sisi, Jakarta, yang PDRB per kapitanya di atas rata-rata nasional mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

Persamaan 5.2. menunjukkan terdapat konvergensi dalam PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia selama tahun 2005 – 2009 dapat dilihat gambarnya sebagai berikut:



Gambar 5.1.
Konvergensi PDRB antar Provinsi Di Indonesia, Tahun 2005-2009

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

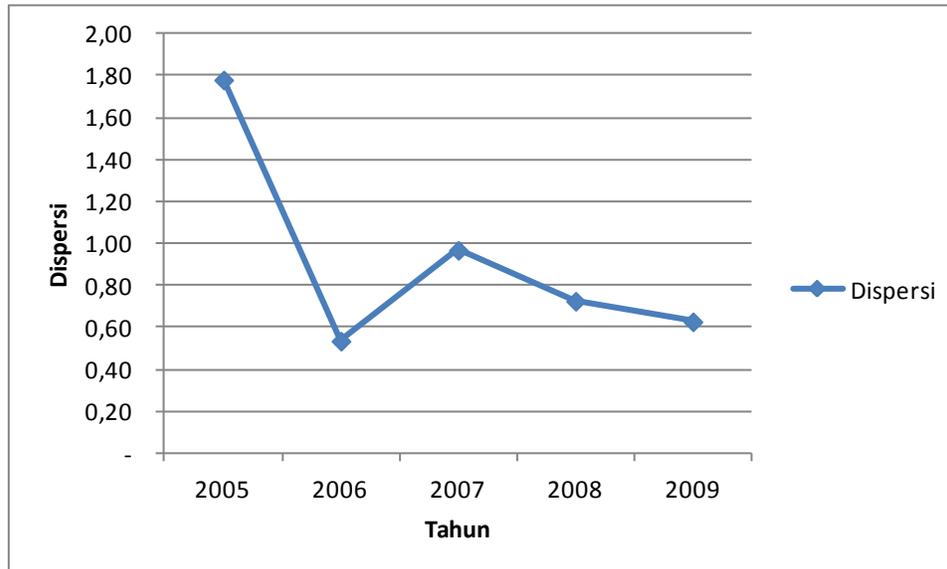
Konsep konvergensi, selain menggunakan pendekatan *absolute β convergence* (*beta convergence*) biasanya juga menggunakan pendekatan *σ -convergence* (*sigma convergence*). Hasil perhitungan *σ -convergence* ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 5.8.
Hasil Pengolahan σ -Convergence pada PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia
Tahun 2005 - 2009

Tahun	σ -Convergence
2005	1,78
2006	0,54
2007	0,97
2008	0,73
2009	0,63

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

Tabel 5.8. dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 5.2.
Dispersi PDRB Per Kapita Tahun 2005 - 2009

Sumber: Hasil pengolahan data BPS

Gambar 5.2. menunjukkan bahwa meskipun tingkat dispersinya masih lebih tinggi dari tahun 2006, namun tren dispersi tahun 2005-2009 cenderung menurun. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita selama tahun 2005-2009 disertai dengan tingkat disparitas PDRB per kapita yang cenderung menurun.

Berdasarkan perhitungan *absolute β convergence* dan *σ -convergence*, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB per kapita Indonesia selama tahun 2005-2009 cenderung disertai dengan proses konvergensi. Namun, perlu juga dicatat bahwa kesimpulan hasil *σ -convergence* tersebut kurang sejalan dengan kesimpulan yang diperoleh dari perhitungan indeks Williamson.

Oleh karenanya, berbeda dengan kesimpulan hasil perhitungan *absolute β convergence* yang cenderung bisa disepakati, namun kesimpulan hasil *σ -convergence* masih belum dapat diterima sepenuhnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut data PDRB, kontributor terbesar bagi nilai tambah produksi Indonesia tahun 2005 – 2009 berasal dari provinsi-provinsi berikut (menurut urutan): DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Keenam provinsi tersebut menyumbang di atas 65 persen nilai tambah produksi nasional.

Memperhatikan tingkat pertumbuhannya, provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas tingkat pertumbuhan rata-rata nasional selama tahun 2005 hingga 2009 adalah DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Namun, apabila menggunakan data PDRB nonmigas, maka provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas tingkat pertumbuhan rata-rata nasional selama tahun 2005 hingga 2009 adalah Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2009 yang sekitar 5,28 persen, sekitar 70,01 persennya disumbang oleh provinsi-provinsi, antara lain, DKI Jakarta (19,73 persen), Jawa Timur (16,53 persen), Jawa Barat (15,46 persen), Jawa Tengah (8,43 persen), Sumatera Utara (6,14 persen), dan Riau (3,72 persen). Namun, berdasarkan data PDRB nonmigas, dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2009 yang sekitar 5,89 persen, sekitar 68,39 persennya disumbang oleh provinsi-provinsi, antara lain, DKI Jakarta (19,21 persen), Jawa Timur (15,90 persen), Jawa Barat (15,01 persen), Jawa Tengah (7,96 persen), Sumatera Utara (5,96 persen), dan Kalimantan Timur (4,35 persen). Namun, apabila memperhatikan basis lapangan usahanya, yang tercermin melalui indikator *location quotient* (LQ), maka provinsi-provinsi yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi tersebut relatif tidak memiliki basis lapangan usaha yang sama.

Memperhatikan PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia, provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah (menurut urutan) DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, dan Papua. Apabila menggunakan data PDRB nonmigas, maka provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah (menurut urutan) DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Secara umum, data PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya relatif rendah pada tahun 2005 mengalami tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi daripada provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan PDRB per kapitanya relatif tinggi. Namun, dari keempat jenis data PDRB yang digunakan, hanya data PDRB menurut harga konstan tahun 2000 per kapita saja yang menunjukkan kecenderungan tersebut secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil perhitungan *absolute β convergence*.

Konsep konvergensi biasanya diinterpretasikan selain menggunakan pendekatan *absolute β convergence* juga *σ -convergence*. Hasil perhitungan *σ -convergence* menunjukkan bahwa meskipun tingkat dispersinya masih lebih tinggi dari tahun 2006, namun tren dispersi tahun 2005-2009 cenderung menurun. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita selama tahun 2005-2009 disertai dengan tingkat disparitas PDRB per kapita yang cenderung menurun.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa kesimpulan *σ -convergence* ternyata kurang sejalan dengan kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan indeks Williamson. Oleh karenanya, kesimpulan mengenai tren disparitas kurang dapat diterima sepenuhnya.

B. Saran

1. Jangka waktu penelitian seyogyanya lebih panjang agar evaluasi pembangunannya dapat lebih tepat terutama mengingat bahwa topik penelitian ini dapat juga dihubungkan dengan pola perubahan struktur pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian ini belum memperhitungkan *β -conditional convergence* untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi konvergensi. Oleh karenanya, penelitian ini perlu dilengkapi dengan hasil perhitungan *β -conditional convergence* agar kesimpulan konvergensi menjadi lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Barro, Robert J., & Xavier Sala-i-Martin. 1995. *Economic Growth*. Singapura: McGraw-Hill.
- Chi, An. 2005. "Catch-up and Regional Disparity in Economic Growth: An Empirical Evidence of the Convergence Hypothesis in China Case". *Forum of International Development Studies*, 30 (Sep. 2005)
- Daryanto, Arief, dan Yundy Hafizrianda. 2010. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Dowling, J. Malcolm, and Ma. Rebecca Valenzuela. 2010. *Economic Development in Asia*. Singapore: Thomson.
- Nazara, Suahasil, 2010. "Pemerataan Antardaerah sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan". *Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, di Balai Sidang UI Depok, 10 Maret.
- Perkins, Dwight H., Steven Radelet, Donald R. Snodgrass, Malcom Gillis, and Michael Roemer. (2001). *Economics of Development*. 5th edition. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Potipiti, Tanapong, 2009. "Output Convergence among Provinces in Thailand". *Thammasat Economic Journal*. Vol. 27, No. 4. (December 2009).
- Roemer, David, 1996. *Advanced Macroeconomics*. Singapore: McGraw-Hill.
- Rustiadi, Erman., Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shin, Inyong, 2008. "Income Inequality and Economic Growth". *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 24397* (31 march 2008).
- Stiglitz, J.E., A. Sen, dan J.P. Fitoussi. 2011. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kemajuan?* (terjemahan: Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur). Bintaro: Marjin Kiri
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Villaverde, Jose, and Adolfo Maza. 2009. "Measurement of Regional Economic Disparities". *United Nations University-Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) Working Papers*. W-2009/12.
- Weil, David N., 2009. *Economic Growth*. Boston: Pearson Education, Inc.

LAMPIRAN DATA

Lampiran 1.a						
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009						
Tahun 2005 - 2009						
(dalam miliar rupiah)						
No	Provinsi	2005	2006	2007	2008*	2009**
1	Nanggroe Aceh Darussalam	56.951,6	69.353,3	71.093,4	73.530,7	70.757,8
2	Sumatera Utara	139.618,3	160.376,8	181.819,7	213.931,7	236.353,6
3	Sumatera Barat	44.674,6	53.029,6	59.799,0	70.614,2	76.295,4
4	Riau	139.019,0	167.068,2	210.002,6	276.400,1	319.510,8
5	Kepulauan Riau	40.984,7	46.216,1	51.826,3	58.586,0	63.893,4
6	Jambi	22.487,0	26.061,8	32.076,7	41.056,5	42.815,9
7	Sumatera Selatan	81.531,5	95.928,8	109.895,7	133.330,7	136.557,6
8	Kepulauan Bangka Belitung	14.171,6	15.920,5	17.895,0	21.523,5	22.613,9
9	Bengkulu	10.134,5	11.397,0	12.874,3	14.502,9	15.532,6
10	Lampung	40.906,8	49.119,0	60.922,0	74.490,6	88.322,5
11	DKI Jakarta	433.860,3	501.771,7	566.449,4	677.411,1	757.023,5
12	Jawa Barat	389.244,7	473.187,3	526.220,2	602.291,4	652.028,9
13	Banten	84.622,8	97.867,3	107.499,7	122.490,7	133.029,4
14	Jawa Tengah	234.435,3	281.996,7	312.428,8	362.938,7	392.983,9
15	DI Yogyakarta	25.337,6	29.417,3	32.916,7	38.102,1	41.427,3
16	Jawa Timur	403.392,4	470.627,5	534.919,3	619.003,6	684.230,9
17	Bali	33.946,5	37.388,5	42.336,4	49.922,6	57.579,3
18	Nusa Tenggara Barat	25.682,7	28.596,9	33.522,2	35.261,7	41.786,3
19	Nusa Tenggara Timur	14.810,5	16.904,1	19.137,0	21.635,2	24.138,7
20	Kalimantan Barat	33.869,5	37.715,0	42.478,6	48.414,4	53.865,8
21	Kalimantan Tengah	20.983,2	24.480,0	27.931,9	32.438,3	36.224,0
22	Kalimantan Selatan	31.794,1	34.670,5	39.438,8	45.758,0	51.177,3
23	Kalimantan Timur	180.289,1	199.588,1	222.628,9	314.213,5	281.414,2
24	Sulawesi Utara	18.763,5	21.216,5	24.081,1	27.843,0	32.049,8
25	Gorontalo	3.480,6	4.062,3	4.760,7	5.906,7	7.082,6
26	Sulawesi Tengah	17.116,6	19.310,3	22.757,6	28.151,5	32.057,2
27	Sulawesi Selatan	51.780,4	60.902,8	69.271,9	85.143,2	99.904,7
28	Sulawesi Barat	4.422,9	5.124,8	6.192,8	7.778,0	8.671,8
29	Sulawesi Tenggara	12.981,0	15.270,4	17.953,1	22.202,8	25.655,9
30	Maluku	4.570,7	5.079,8	5.698,8	6.269,7	7.069,1
31	Maluku Utara	2.583,1	2.818,4	3.160,0	3.856,4	4.687,8
32	Papua	43.615,3	46.895,2	55.380,5	54.221,6	66.651,9
33	Papua Barat	7.913,8	8.945,5	10.367,3	12.469,0	14.547,7
	Total	2.669.976,2	3.118.308,0	3.535.736,4	4.201.690,1	4.577.941,5
Sumber: BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010						
Catatan:						
*)	Angka Sementara					
**)	Angka sangat sementara					

Lampiran 1.b						
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku						
Tahun 2005 - 2009						
(dalam miliar rupiah)						
No	Provinsi	2005	2006	2007	2008*	2009**
1	Nanggroe Aceh Darussalam	35.449,3	43.465,8	49.718,2	54.193,1	57.548,6
2	Sumatera Utara	138.556,3	159.187,9	180.375,4	212.145,5	234.473,5
3	Sumatera Barat	44.674,6	53.029,6	59.799,0	70.614,2	76.295,4
4	Riau	79.065,4	94.815,6	117.035,0	149.125,2	179.196,6
5	Kepulauan Riau	37.414,6	41.950,5	47.420,4	53.852,7	59.062,3
6	Jambi	18.404,0	22.080,2	26.193,6	31.271,2	35.750,0
7	Sumatera Selatan	52.726,7	63.500,1	74.905,3	88.766,6	98.133,2
8	Kepulauan Bangka Belitung	13.535,5	15.299,6	17.369,4	20.948,5	22.050,7
9	Bengkulu	10.134,5	11.397,0	12.874,3	14.502,9	15.532,6
10	Lampung	39.407,3	47.706,4	59.485,5	73.031,8	87.417,0
11	DKI Jakarta	431.900,9	499.354,1	563.813,3	674.189,8	753.939,0
12	Jawa Barat	370.693,8	448.250,5	501.445,2	572.339,2	627.534,9
13	Banten	84.622,8	97.867,3	107.499,7	122.490,7	133.029,4
14	Jawa Tengah	203.097,8	243.041,7	272.614,7	311.348,8	342.307,3
15	DI Yogyakarta	25.337,6	29.417,3	32.916,7	38.102,1	41.427,3
16	Jawa Timur	402.497,6	469.504,0	533.367,1	617.087,8	681.790,1
17	Bali	33.946,5	37.388,5	42.336,4	49.922,6	57.579,3
18	Nusa Tenggara Barat	25.682,7	28.596,9	33.522,2	35.261,7	41.786,3
19	Nusa Tenggara Timur	14.810,5	16.904,1	19.137,0	21.635,2	24.138,7
20	Kalimantan Barat	33.869,5	37.715,0	42.478,6	48.414,4	53.865,8
21	Kalimantan Tengah	20.983,2	24.480,0	27.931,9	32.438,3	36.224,0
22	Kalimantan Selatan	31.282,9	34.142,3	38.852,8	45.132,2	50.548,3
23	Kalimantan Timur	68.106,5	82.234,4	98.007,7	133.585,6	151.328,4
24	Sulawesi Utara	18.744,5	21.190,0	24.052,1	27.810,5	32.010,4
25	Gorontalo	3.480,6	4.062,3	4.760,7	5.906,7	7.082,6
26	Sulawesi Tengah	17.053,3	19.068,3	22.294,1	27.489,5	31.324,1
27	Sulawesi Selatan	51.650,6	60.756,4	69.107,1	84.966,3	99.707,8
28	Sulawesi Barat	4.422,9	5.124,8	6.192,8	7.778,0	8.671,8
29	Sulawesi Tenggara	12.981,0	15.270,4	17.953,1	22.202,8	25.655,9
30	Maluku	4.551,5	5.059,6	5.682,7	6.251,9	7.049,3
31	Maluku Utara	2.583,1	2.818,4	3.160,0	3.856,4	4.687,8
32	Papua	43.615,3	46.895,2	55.380,5	54.221,6	66.651,9
33	Papua Barat	5.427,9	6.367,6	7.449,6	8.733,3	10.210,9
	Total	2.380.711,2	2.787.941,8	3.175.132,1	3.719.617,1	4.154.011,2
Sumber: BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010						
Catatan:						
*)	Angka Sementara					
**)	Angka sangat sementara					

Lampiran 1.c						
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000						
Tahun 2005 - 2009						
(dalam miliar rupiah)						
No	Provinsi	2005	2006	2007	2008*	2009**
1	Nanggroe Aceh Darussalam	36.287,9	36.853,9	35.983,1	34.085,5	32.182,8
2	Sumatera Utara	87.897,8	93.347,4	99.792,3	106.172,4	111.559,2
3	Sumatera Barat	29.159,5	30.949,9	32.913,0	35.007,9	36.464,6
4	Riau	79.287,6	83.370,9	86.213,3	91.085,4	93.729,5
5	Kepulauan Riau	30.381,5	32.441,0	34.713,8	37.021,4	38.322,7
6	Jambi	12.620,0	13.363,6	14.275,2	15.297,8	16.272,3
7	Sumatera Selatan	49.633,5	52.214,6	55.262,1	58.065,5	60.446,5
8	Kepulauan Bangka Belitung	8.707,3	9.053,6	9.464,5	9.889,5	10.238,4
9	Bengkulu	6.239,4	6.610,6	7.037,4	7.384,0	7.682,1
10	Lampung	29.397,2	30.861,4	32.694,9	34.414,7	36.160,5
11	DKI Jakarta	295.270,5	312.826,7	332.971,3	353.694,1	371.399,3
12	Jawa Barat	242.883,9	257.499,4	274.180,3	290.180,0	302.629,6
13	Banten	58.106,9	61.341,7	65.046,8	68.802,9	72.031,1
14	Jawa Tengah	143.051,2	150.682,7	159.110,3	167.790,4	175.685,3
15	DI Yogyakarta	16.910,9	17.535,7	18.291,5	19.208,9	20.051,5
16	Jawa Timur	256.374,7	271.249,3	287.814,2	304.922,7	320.210,5
17	Bali	21.072,4	22.184,7	23.497,0	24.900,6	26.228,3
18	Nusa Tenggara Barat	15.183,8	15.603,8	16.369,2	16.799,8	18.310,4
19	Nusa Tenggara Timur	9.867,3	10.368,5	10.902,4	11.426,6	11.910,9
20	Kalimantan Barat	23.538,4	24.768,4	26.260,6	27.682,9	29.001,8
21	Kalimantan Tengah	14.034,6	14.853,7	15.754,5	16.725,5	17.642,2
22	Kalimantan Selatan	23.292,5	24.452,3	25.922,3	27.538,5	28.918,9
23	Kalimantan Timur	93.938,0	96.612,8	98.386,4	103.102,4	105.493,7
24	Sulawesi Utara	12.744,5	13.473,1	14.344,3	15.428,4	16.638,9
25	Gorontalo	2.027,7	2.175,8	2.339,2	2.520,7	2.710,7
26	Sulawesi Tengah	11.752,2	12.671,5	13.683,9	14.745,3	15.874,7
27	Sulawesi Selatan	36.421,8	38.867,7	41.332,4	44.549,8	47.314,0
28	Sulawesi Barat	3.106,7	3.321,1	3.567,8	3.872,5	4.106,0
29	Sulawesi Tenggara	8.026,9	8.643,3	9.331,7	10.010,6	10.768,6
30	Maluku	3.259,2	3.440,1	3.633,5	3.787,1	3.992,8
31	Maluku Utara	2.236,8	2.359,5	2.501,2	2.650,8	2.810,2
32	Papua	22.209,2	18.402,2	19.200,3	19.051,2	22.926,5
33	Papua Barat	5.307,3	5.548,9	5.934,3	6.369,4	6.768,2
	Total	1.690.229,1	1.777.949,8	1.878.725,0	1.984.185,2	2.076.482,7
Sumber: BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010						
Catatan:						
*)	Angka Sementara					
**)	Angka sangat sementara					

Lampiran 1.d						
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000						
Tahun 2005 - 2009						
(dalam miliar rupiah)						
No	Provinsi	2005	2006	2007	2008*	2009**
1	Nanggroe Aceh Darussalam	22.531,8	24.267,8	26.022,2	26.510,6	27.549,1
2	Sumatera Utara	87.240,3	92.699,0	99.085,7	105.431,9	110.850,7
3	Sumatera Barat	29.159,5	30.949,9	32.913,0	35.007,9	36.464,6
4	Riau	33.516,5	36.417,6	39.420,8	42.596,9	45.338,4
5	Kepulauan Riau	28.559,8	30.625,3	32.937,7	35.314,3	36.604,7
6	Jambi	11.062,3	11.985,8	12.775,1	13.716,5	14.662,4
7	Sumatera Selatan	36.317,7	38.971,0	42.106,1	44.763,1	47.022,9
8	Kepulauan Bangka Belitung	8.383,0	8.785,6	9.257,0	9.702,8	10.068,5
9	Bengkulu	6.239,4	6.610,6	7.037,4	7.384,0	7.682,1
10	Lampung	28.837,1	30.367,2	32.231,9	33.951,0	35.759,5
11	DKI Jakarta	294.354,6	311.893,7	332.033,9	352.753,7	370.499,7
12	Jawa Barat	234.010,9	248.774,4	265.834,0	281.719,5	293.548,7
13	Banten	58.106,9	61.341,7	65.046,8	68.802,9	72.031,1
14	Jawa Tengah	133.578,0	140.681,4	149.083,1	157.023,6	165.188,0
15	DI Yogyakarta	16.910,9	17.535,7	18.291,5	19.208,9	20.051,5
16	Jawa Timur	255.745,0	270.564,9	286.912,1	303.838,2	318.854,3
17	Bali	21.072,4	22.184,7	23.497,0	24.900,6	26.228,3
18	Nusa Tenggara Barat	15.183,8	15.603,8	16.369,2	16.799,8	18.310,4
19	Nusa Tenggara Timur	9.867,3	10.368,5	10.902,4	11.426,6	11.910,9
20	Kalimantan Barat	23.538,4	24.768,4	26.260,6	27.682,9	29.001,8
21	Kalimantan Tengah	14.034,6	14.853,7	15.754,5	16.725,5	17.642,2
22	Kalimantan Selatan	22.841,0	23.995,3	25.454,0	27.074,5	28.458,4
23	Kalimantan Timur	42.478,0	47.840,7	52.736,8	55.965,6	59.523,6
24	Sulawesi Utara	12.725,6	13.449,5	14.319,2	15.401,4	16.607,0
25	Gorontalo	2.027,7	2.175,8	2.339,2	2.520,7	2.710,7
26	Sulawesi Tengah	11.710,9	12.556,5	13.467,2	14.465,3	15.574,4
27	Sulawesi Selatan	36.337,2	38.781,5	41.242,7	44.456,8	47.213,0
28	Sulawesi Barat	3.106,7	3.321,1	3.567,8	3.872,5	4.106,0
29	Sulawesi Tenggara	8.026,9	8.643,3	9.331,7	10.010,6	10.768,6
30	Maluku	3.244,4	3.425,0	3.621,7	3.774,8	3.980,1
31	Maluku Utara	2.236,8	2.359,5	2.501,2	2.650,8	2.810,2
32	Papua	22.209,2	18.402,2	19.200,3	19.051,2	22.926,5
33	Papua Barat	3.915,9	4.204,0	4.566,1	4.962,3	5.327,7
	Total	1.539.110,5	1.629.405,1	1.736.119,9	1.839.467,7	1.935.276,0
Sumber: BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010						
Catatan:						
*)	Angka Sementara					
**)	Angka sangat sementara					

Lampiran 2.a
Location Quotient (LQ) Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009

LAPANGAN USAHA	ACEH		SUMUT		SUMBAR		RIAU		JAMBI		SUMSEL		BENGKULU		LAMPUNG	
	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	1,26	1,69	1,58	1,57	1,49	1,51	1,09	1,19	1,90	2,07	1,24	1,32	2,43	2,52	2,76	2,79
a. Tanaman bahan Makanan	1,03	1,34	1,11	1,03	1,53	1,52	0,28	0,27	1,48	1,52	0,59	0,64	2,23	2,27	2,78	2,62
b. Tanaman Perkebunan	1,58	2,19	3,89	4,14	2,22	2,42	2,51	3,07	5,04	6,32	3,57	3,97	4,88	5,52	4,20	4,54
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	1,65	2,34	1,30	1,30	0,96	0,97	0,42	0,52	1,17	1,09	0,72	0,81	1,41	1,51	2,46	2,48
d. Kehutanan	1,27	1,83	1,37	1,53	1,50	1,46	5,96	6,90	1,96	1,92	1,69	1,74	1,59	1,54	0,43	0,51
e. Perikanan	1,33	1,74	1,04	1,01	1,07	1,05	0,67	0,74	0,61	0,51	1,16	1,12	1,80	1,57	2,48	2,68
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2,37	0,92	0,12	0,13	0,30	0,32	5,53	5,69	1,22	1,28	2,58	2,51	0,30	0,56	0,30	0,23
a. Pertambangan Minyak Gas Bumi (Migas)	3,96	1,49	0,10	0,11	-	-	9,35	10,56	1,90	1,91	3,69	3,88	-	-	0,32	0,24
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	0,18	0,17	0,06	0,17	-	0,38	0,92	0,89	0,78	1,41	-	0,00
c. Penggalian	0,51	1,15	0,61	0,61	2,57	2,25	0,34	0,39	1,08	1,11	1,33	1,27	0,51	0,51	1,20	0,89
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0,86	0,63	0,79	0,77	0,40	0,42	0,43	0,49	0,48	0,48	0,71	0,72	0,13	0,14	0,44	0,48
a. Industri Migas	3,78	2,87	0,04	0,04	-	-	0,97	1,11	0,27	0,30	1,42	1,50	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	0,09	0,10	-	-	2,23	2,46	0,61	0,66	3,25	3,31	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	6,70	5,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	0,12	0,17	0,86	0,83	0,45	0,46	0,27	0,34	0,48	0,47	0,48	0,51	0,14	0,15	0,49	0,53
c. Restoran	0,21	0,36	1,12	0,84	1,52	1,29	0,30	0,26	1,07	0,93	0,64	0,57	0,58	0,55	0,50	0,43
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,28	0,57	1,03	0,93	1,99	1,91	0,37	0,37	1,28	1,29	0,74	0,73	0,34	0,38	0,57	0,58
a. Listrik	-	-	1,13	0,26	-	-	-	-	-	-	0,13	0,07	-	-	-	-
b. Gas	0,11	0,11	1,47	1,61	0,89	0,99	0,29	0,30	1,15	1,08	0,67	0,79	2,13	2,51	0,69	0,55
c. Air Bersih	0,51	0,94	0,96	0,95	0,72	0,66	0,44	0,50	0,65	0,68	1,11	1,11	0,43	0,41	0,80	0,71
5. KONSTRUKSI	0,73	1,00	0,98	0,98	0,94	0,93	0,40	0,49	0,93	0,92	0,70	0,74	1,06	1,05	0,88	0,89
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	0,86	1,18	1,06	1,06	1,10	1,09	0,47	0,57	1,02	1,02	0,78	0,82	1,21	1,20	0,97	0,99
a. Perdagangan Besar & Eceran	0,06	0,08	0,37	0,39	0,19	0,22	0,16	0,20	0,27	0,36	0,12	0,15	0,12	0,20	0,11	0,10
b. Hotel	0,16	0,23	0,71	0,68	0,18	0,18	0,05	0,06	0,57	0,46	0,39	0,44	0,47	0,45	0,54	0,51
c. Restoran	1,19	1,29	2,23	1,76	3,21	2,43	0,71	0,58	2,26	1,55	1,00	0,87	2,38	1,57	1,62	1,23
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	0,88	1,42	1,67	1,91	2,34	2,51	0,55	0,65	1,77	1,79	0,68	0,76	1,91	1,82	1,19	1,25
a. Pengangkutan	-	-	1,11	1,25	1,95	2,28	-	-	-	-	4,16	3,99	-	-	7,55	8,21
1. Angkutan Rel	1,77	2,86	1,66	1,87	3,63	3,81	0,88	1,00	2,68	2,67	0,86	0,95	3,26	3,00	1,81	1,94
2. Angkutan Jalan Raya	0,44	0,73	0,84	1,02	1,43	1,56	0,53	1,00	1,76	2,24	0,69	0,89	2,95	3,53	0,90	0,81
3. Angkutan Laut	0,04	0,04	0,34	0,36	1,18	1,41	0,70	-	3,34	2,97	0,70	0,72	0,42	0,45	2,17	2,93
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeber	0,37	0,46	3,36	3,48	1,78	1,86	0,24	0,27	1,10	0,96	0,49	0,55	0,38	0,39	0,06	0,12
5. Angkutan Udara	0,03	0,04	1,24	1,40	1,10	1,19	0,18	0,23	0,45	0,48	0,34	0,39	0,17	0,20	0,59	0,57
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,30	0,21	0,53	0,32	0,92	0,63	0,11	0,09	0,26	0,12	0,45	0,42	0,17	0,12	0,45	0,33
b. Komunikasi	0,11	0,17	0,61	0,67	0,47	0,47	0,10	0,13	0,38	0,52	0,37	0,40	0,45	0,43	0,64	0,82
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN	0,09	0,24	0,34	0,48	0,37	0,40	0,06	0,11	0,24	0,64	0,06	0,07	0,24	0,25	0,49	0,99
a. Bank	0,10	0,12	0,43	0,39	1,41	1,31	0,10	0,10	0,37	0,34	0,06	0,06	0,97	0,85	0,43	0,46
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	0,56	0,60	-	-	-	-	0,22	0,42	-	-	-	-	-	-
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,21	0,18	1,11	1,12	0,61	0,58	0,20	0,22	0,78	0,72	1,01	1,06	0,75	0,69	1,27	1,18
d. Real Estat	0,02	0,02	0,53	0,47	0,08	0,07	0,04	0,04	0,05	0,05	0,22	0,22	0,28	0,24	0,07	0,07
e. Jasa Perusahaan	1,25	1,77	1,25	1,28	2,05	2,00	0,53	0,63	1,07	0,99	1,01	1,16	2,01	1,96	0,97	0,94
9. JASA-JASA	2,41	3,64	1,32	1,48	2,29	2,27	0,72	0,90	1,65	1,63	0,90	1,10	2,40	2,68	1,38	1,30
a. Pemerintahan Umum	0,14	0,17	0,60	0,57	0,93	0,90	0,19	0,21	0,29	0,25	0,55	0,60	0,84	0,71	0,31	0,34
b. Swasta	0,30	0,37	0,68	0,67	1,28	1,27	0,06	0,06	0,73	0,64	0,88	1,02	0,77	0,71	0,57	0,68
1. Sosial & Kemasyarakatan	0,26	0,30	1,35	1,29	1,35	1,31	0,27	0,31	0,23	0,19	0,08	0,08	0,44	0,38	0,13	0,14
2. Hiburan & Rekreasi	0,06	0,08	0,48	0,44	0,74	0,70	0,23	0,25	0,12	0,11	0,48	0,50	0,92	0,75	0,23	0,23
3. Perorangan & Rumah Tangga																

Sumber: diolah dari data BPS. PDRB Lapangan Usaha dan Statistik Indonesia

Lampiran 2.b
Location Quotient (LQ) Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009

LAPANGAN USAHA	BANGBEL		KEP. RIAU		JAKARTA		JABAR		JATENG		YOGYA		JATIM		BANTEN		
	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN																	
a. Tanaman bahan Makanan	0,35	0,37	0,03	0,03	0,01	0,01	0,93	0,95	1,28	1,27	1,16	1,19	1,11	1,02	0,55	0,52	
b. Tanaman Perkebunan	4,83	5,14	0,11	0,10	0,01	0,01	0,32	0,33	0,75	0,78	0,18	0,20	1,23	0,94	0,25	0,26	
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	0,39	0,43	0,39	0,41	0,00	0,00	1,10	1,00	1,11	1,32	1,29	1,30	1,36	1,37	0,81	0,81	
d. Kehutanan	0,59	0,62	0,06	0,07	-	-	0,18	0,14	0,44	0,38	0,89	1,09	0,16	0,23	0,05	0,05	
e. Perikanan	3,09	3,08	1,51	1,40	0,01	0,01	0,32	0,28	0,47	0,45	0,17	0,19	0,66	0,78	0,30	0,39	
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,75	1,69	0,70	0,63	0,03	0,03	0,29	0,28	0,10	0,12	0,07	0,07	0,19	0,24	0,01	0,01	
a. Pertambangan Minyak Gas Bumi (Migas)	0,64	0,36	1,04	0,97	0,05	0,05	0,46	0,48	0,01	0,01	-	-	0,04	0,08	-	-	
b. Pertambangan Bukan Migas	3,42	3,32	0,17	0,19	-	-	0,02	0,02	0,00	0,00	-	-	0,05	0,06	0,01	0,01	
c. Penggalian	3,01	2,78	0,43	0,38	-	-	0,18	0,15	0,97	0,98	0,72	0,64	1,60	1,47	0,08	0,10	
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0,76	0,80	1,81	1,85	0,55	0,53	1,47	1,58	1,23	1,31	0,46	0,44	0,90	0,88	1,62	1,57	
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	0,32	0,33	2,11	2,46	-	-	-	-	-	-	
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-	-	0,73	0,72	4,84	5,45	-	-	-	-	-	-	
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Industri Bukan Migas	0,85	0,88	2,01	2,02	0,61	0,58	1,57	1,66	0,90	0,99	0,51	0,48	1,00	0,96	1,80	1,71	
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,76	0,66	0,33	0,64	0,90	0,75	3,29	2,70	1,11	0,96	1,22	1,05	2,40	4,79	6,09	4,70	
a. Listrik	1,08	1,06	0,40	0,41	0,80	0,72	4,13	3,52	1,44	1,40	1,62	1,61	2,83	1,74	7,81	5,56	
b. Gas	-	-	-	1,30	1,04	0,56	1,67	1,49	-	-	-	-	2,23	0,35	4,08	4,58	
c. Air Bersih	0,10	0,09	0,35	0,38	1,22	1,25	1,19	1,24	0,75	0,85	0,64	0,58	0,76	28,74	0,65	0,75	
5. KONSTRUKSI	0,87	0,97	0,42	0,67	1,48	1,43	0,51	0,49	0,84	0,81	1,24	1,33	0,54	0,44	0,42	0,43	
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1,09	1,08	1,28	1,27	1,14	1,13	1,08	1,15	1,11	1,13	1,08	1,09	1,60	1,57	1,00	1,13	
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,24	1,24	1,33	1,28	1,07	1,06	1,13	1,22	1,12	1,15	0,56	0,57	1,56	1,56	1,02	1,16	
b. Hotel	0,11	0,12	2,81	3,61	1,35	1,33	0,55	0,65	0,48	0,50	2,39	2,38	1,15	1,10	0,15	0,17	
c. Restoran	0,47	0,45	0,45	0,52	1,50	1,50	0,98	0,84	1,25	1,18	3,89	3,79	1,95	1,74	1,15	1,19	
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	0,92	0,72	1,07	0,91	1,67	1,49	1,09	0,76	1,24	0,91	2,42	1,79	1,44	1,09	2,31	1,77	
a. Pengangkutan	0,70	0,81	0,83	1,03	0,89	0,94	0,74	0,71	0,90	0,94	1,66	1,74	1,00	0,91	1,77	1,91	
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	1,43	1,85	2,69	2,18	1,82	2,07	5,52	6,33	1,61	1,31	0,85	1,18	
2. Angkutan Jalan Raya	0,89	0,97	1,08	1,22	0,95	1,01	1,41	1,34	1,69	1,74	3,11	3,12	0,95	0,69	1,75	1,94	
3. Angkutan Laut	0,72	0,91	1,48	2,54	1,84	2,11	0,17	0,05	0,76	0,94	-	-	0,53	0,62	1,31	1,30	
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeber	0,49	0,58	-	-	0,01	0,01	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,27	0,19	1,13	1,11
5. Angkutan Udara	1,09	1,23	0,75	0,85	0,02	0,02	0,26	0,31	0,11	0,09	1,39	1,39	1,08	0,99	3,41	3,25	
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,14	0,20	0,22	0,30	0,95	1,11	0,22	0,20	0,20	0,21	0,26	0,32	1,37	1,49	1,10	1,23	
b. Komunikasi	0,17	0,09	0,18	0,10	1,49	1,22	0,47	0,29	0,38	0,24	1,04	0,61	0,59	0,58	0,41	0,33	
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN	0,35	0,35	0,46	0,47	2,98	2,66	0,32	0,31	0,34	0,35	0,93	0,88	0,49	0,50	0,30	0,37	
a. Bank	0,08	0,09	0,69	0,78	3,93	3,46	0,19	0,25	0,09	0,11	0,32	0,37	0,28	0,30	0,20	0,28	
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,18	0,16	0,20	0,20	2,87	2,75	0,37	0,47	0,58	0,56	1,25	1,10	0,71	0,72	0,20	0,21	
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	4,07	4,03	-	-	1,32	1,26	0,41	0,39	-	-	-	-	
d. Real Estat	0,95	0,91	0,45	0,43	1,40	1,31	0,52	0,39	0,79	0,78	2,19	1,94	0,59	0,61	0,54	0,66	
e. Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,02	0,02	3,24	2,99	0,29	0,25	0,08	0,08	0,21	0,20	0,81	0,67	0,19	0,18	
9. JASA-JASA	0,82	0,93	0,31	0,35	1,95	1,92	1,01	0,97	1,16	1,16	2,14	2,07	1,27	1,45	0,65	0,73	
a. Pemerintahan Umum	0,91	1,13	0,19	0,27	0,65	0,61	0,86	0,80	1,70	1,73	2,48	2,54	0,80	0,64	0,45	0,55	
b. Swasta	0,38	0,39	0,21	0,21	1,52	1,46	0,57	0,55	0,35	0,36	0,92	0,86	0,83	1,03	0,41	0,44	
1. Sosial & Kemasyarakatan	0,37	0,38	0,10	0,12	1,92	1,82	0,39	0,37	0,47	0,49	1,65	1,53	0,50	0,51	0,44	0,50	
2. Hiburan & Rekreasi	0,03	0,02	0,56	0,60	2,10	2,42	0,19	0,21	0,16	0,16	0,93	0,90	0,58	0,64	0,20	0,21	
3. Perorangan & Rumah Tangga	0,42	0,44	0,21	0,20	1,30	1,21	0,69	0,66	0,33	0,34	0,64	0,60	0,99	1,27	0,43	0,44	

Sumber: diolah dari data BPS. PDRB Lapangan Usaha dan Statistik Indonesia

Lampiran 2.c
Location Quotient (LQ) Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009

LAPANGAN USAHA	BALI		NTB		NTT		KALBAR		KALTENG		KALSEL		KALTIM		SULUT	
	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	1,30	1,26	1,64	1,62	2,51	2,54	1,65	1,73	2,39	2,15	1,55	1,66	0,34	0,37	1,31	1,22
a. Tanaman bahan Makanan	1,39	1,25	1,95	1,92	2,55	2,51	1,30	1,38	0,86	0,71	1,41	1,54	0,13	0,15	0,82	0,75
b. Tanaman Perkebunan	0,39	0,41	1,39	1,23	1,80	1,89	3,69	3,97	6,66	6,53	2,43	2,68	0,28	0,40	2,99	2,76
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	2,38	2,58	1,86	1,96	5,60	5,80	1,41	1,52	1,90	1,93	0,75	0,90	0,29	0,35	0,98	1,03
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,08	0,08	0,23	0,29	1,58	1,54	4,73	2,54	1,28	1,38	1,89	1,80	0,29	0,33
e. Perikanan	1,64	1,53	1,41	1,33	1,50	1,52	0,91	0,93	2,36	2,47	1,86	1,71	0,47	0,56	1,88	1,68
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,06	0,06	2,73	2,93	0,13	0,14	0,12	0,19	0,63	1,02	2,12	2,44	2,98	3,74	0,48	0,55
a. Pertambangan Minyak Gas Bumi (Mig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	0,34	3,15	3,27	0,02	0,04
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	7,92	7,54	-	-	0,10	0,23	1,84	2,71	5,71	6,03	3,44	5,52	0,41	0,37
c. Penggalian	0,62	0,52	2,15	2,26	1,36	1,19	0,93	0,95	0,45	0,54	1,16	1,06	0,42	0,48	3,54	3,38
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0,29	0,33	0,15	0,17	0,05	0,05	0,65	0,62	0,29	0,28	0,42	0,38	1,77	1,61	0,24	0,26
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,28	8,88	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,71	3,95	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,81	12,95	-
b. Industri Bukan Migas	0,33	0,36	0,17	0,19	0,06	0,06	0,72	0,67	0,32	0,30	0,47	0,42	0,15	0,17	0,26	0,28
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,93	1,71	0,42	0,42	0,56	0,46	0,64	0,51	0,67	0,52	0,73	0,58	0,32	0,31	0,99	0,88
a. Listrik	2,14	2,09	0,43	0,52	0,59	0,56	0,64	0,58	0,63	0,53	0,80	0,71	0,40	0,44	1,12	1,16
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	2,81	3,46	0,75	0,85	0,93	0,91	1,24	1,24	1,47	1,57	1,08	1,19	0,28	0,35	1,34	1,37
5. KONSTRUKSI	0,57	0,50	1,04	1,12	1,03	0,87	1,25	1,18	0,72	0,80	0,84	0,79	0,37	0,45	2,28	2,16
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1,60	1,65	0,75	0,80	0,86	0,87	1,33	1,16	0,96	0,99	0,82	0,83	0,31	0,38	0,75	0,82
a. Perdagangan Besar & Eceran	0,75	0,74	0,80	0,86	1,01	1,03	1,57	1,37	1,07	1,11	0,88	0,89	0,33	0,42	0,74	0,79
b. Hotel	13,71	15,15	0,68	0,81	0,26	0,28	0,34	0,36	0,36	0,35	0,31	0,32	0,21	0,25	1,62	2,41
c. Restoran	3,01	3,14	0,45	0,45	0,10	0,10	0,18	0,18	0,51	0,48	0,67	0,64	0,22	0,23	0,56	0,54
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2,65	2,01	1,99	1,43	1,79	1,33	1,87	1,61	2,17	1,62	2,32	1,69	0,99	0,90	3,09	2,39
a. Pengangkutan	1,98	2,21	1,48	1,56	1,35	1,43	1,39	1,64	1,73	1,90	1,78	1,89	0,75	1,00	2,40	2,71
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	1,13	1,16	2,67	2,67	2,27	2,21	0,85	0,93	1,54	1,87	1,90	1,97	0,42	0,61	3,11	3,54
3. Angkutan Laut	0,83	1,13	0,25	0,33	1,43	1,97	1,36	1,64	0,71	1,60	4,68	6,24	0,66	1,04	4,30	5,92
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeber	1,05	1,06	2,70	2,80	0,74	0,77	11,66	12,47	21,20	18,23	2,55	2,46	2,71	3,13	0,20	0,28
5. Angkutan Udara	5,54	5,66	1,05	1,17	0,21	0,40	1,11	1,20	0,51	0,53	1,11	0,99	0,68	0,74	2,15	1,88
6. Jasa Penunjang Angkutan	2,01	2,17	0,19	0,21	0,55	0,67	1,41	1,72	0,62	0,77	0,33	0,38	1,18	1,62	0,64	0,76
b. Komunikasi	0,62	0,33	0,49	0,25	0,38	0,27	0,34	0,46	0,16	0,10	0,40	0,23	0,18	0,13	0,44	0,27
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAA	0,70	0,64	0,46	0,50	0,30	0,34	0,50	0,54	0,44	0,53	0,37	0,39	0,19	0,25	0,60	0,59
a. Bank	0,44	0,45	0,40	0,54	0,27	0,41	0,23	0,27	0,23	0,35	0,29	0,35	0,09	0,16	0,67	0,72
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,76	0,65	0,66	0,61	0,95	0,93	1,89	1,62	0,99	1,32	0,40	0,40	0,12	0,13	0,38	0,38
c. Jasa Penunjang Keuangan	3,26	3,31	-	-	-	-	0,05	0,41	0,46	0,06	0,05	0,01	0,01	-	-	-
d. Real Estat	1,24	1,05	0,74	0,71	0,31	0,26	0,77	0,91	0,79	0,81	0,68	0,66	0,30	0,35	0,66	0,59
e. Jasa Perusahaan	0,33	0,28	0,05	0,05	0,08	0,07	0,07	0,06	0,10	0,10	0,05	0,05	0,28	0,35	0,45	0,43
9. JASA-JASA	1,95	1,84	1,16	1,15	2,86	2,89	1,11	1,22	1,40	1,41	0,94	0,95	0,18	0,21	1,99	1,81
a. Pemerintahan Umum	1,52	1,55	1,93	2,04	3,40	3,90	2,15	2,45	2,33	2,52	1,73	1,86	0,26	0,29	2,41	2,21
b. Swasta	1,16	1,03	0,25	0,24	1,20	1,06	0,12	0,15	0,30	0,29	0,14	0,13	0,06	0,07	0,82	0,76
1. Sosial & Kemasyarakatan	0,21	0,19	0,65	0,62	2,89	2,59	0,15	0,18	0,55	0,57	0,22	0,21	0,06	0,07	1,35	1,27
2. Hiburan & Rekreasi	0,88	0,82	0,10	0,08	0,07	0,07	0,28	0,25	0,15	0,16	0,19	0,18	0,04	0,05	0,98	0,96
3. Perorangan & Rumah Tangga	1,56	1,37	0,12	0,11	0,66	0,60	0,08	0,12	0,22	0,20	0,10	0,09	0,06	0,07	0,59	0,54

Sumber: diolah dari data BPS. PDRB Lapangan Usaha dan Statistik Indonesia

Lampiran 2.d
Location Quotient (LQ) Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009

LAPANGAN USAHA	SULTENG		SULSEL		SULTENGG		GORONTALO		SULBAR		MALUKU		MALUT	
	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	2,79	2,69	2,01	1,95	2,39	2,24	1,84	1,91	3,68	3,29	2,09	2,07	2,26	2,42
a. Tanaman bahan Makanan	1,79	1,70	1,90	1,92	0,99	0,82	1,71	1,78	2,68	2,39	1,08	1,00	1,19	1,30
b. Tanaman Perkebunan	6,68	6,55	3,20	2,75	5,28	4,63	2,64	2,46	11,23	9,10	2,75	2,88	7,24	7,98
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	1,27	1,26	0,64	0,67	2,75	2,77	2,11	2,31	1,34	1,26	0,58	0,57	0,71	0,69
d. Kehutanan	3,94	4,58	0,15	0,15	1,19	1,34	0,84	1,09	0,93	0,95	1,63	1,59	2,26	2,40
e. Perikanan	2,81	2,52	3,08	2,90	4,20	4,25	1,68	1,77	2,34	2,89	6,18	5,89	1,95	1,90
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,20	0,38	0,99	0,92	0,56	0,57	0,09	0,11	0,06	0,12	0,08	0,08	0,47	0,47
a. Pertambangan Minyak Gas Bumi (Migas)	0,06	0,33	0,04	0,05	-	-	-	-	-	-	0,07	0,07	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	0,00	2,80	2,23	1,33	1,03	0,03	0,01	-	-	-	-	1,33	1,17
c. Penggalian	1,74	1,70	0,82	0,88	1,49	1,75	0,82	0,94	0,60	1,01	0,37	0,35	0,49	0,48
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0,21	0,22	0,47	0,49	0,24	0,28	0,30	0,26	0,27	0,32	0,15	0,17	0,51	0,45
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	0,24	0,24	0,52	0,53	0,27	0,31	0,33	0,28	0,30	0,34	0,17	0,19	0,56	0,49
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,04	0,84	1,33	1,23	0,98	0,88	0,85	0,62	0,47	0,53	0,75	0,49	0,66	0,55
a. Listrik	1,33	1,19	1,68	1,78	1,35	1,34	0,95	0,81	0,62	0,81	0,97	0,70	0,52	0,48
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,79	0,91	1,06	1,15	0,33	0,52	1,21	0,98	0,29	0,23	0,52	0,45	1,85	2,00
5. KONSTRUKSI	0,98	0,93	0,74	0,81	1,21	1,22	1,09	1,17	0,49	0,81	0,20	0,18	0,25	0,26
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	0,68	0,68	0,82	0,91	0,86	0,92	0,73	0,72	0,75	0,72	1,32	1,36	1,36	1,44
a. Perdagangan Besar & Eceran	0,78	0,78	0,90	1,00	1,02	1,09	0,74	0,72	0,88	0,84	1,53	1,59	1,62	1,72
b. Hotel	0,26	0,27	0,29	0,33	0,05	0,05	0,18	0,19	0,04	0,07	0,51	0,56	0,28	0,29
c. Restoran	0,21	0,20	0,51	0,52	0,14	0,16	0,84	0,86	0,18	0,18	0,28	0,27	0,09	0,08
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1,86	1,47	2,05	1,60	2,08	1,67	2,68	1,95	0,78	0,63	2,75	2,16	1,84	1,43
a. Pengangkutan	1,49	1,72	1,50	1,71	1,59	1,84	2,07	2,20	0,60	0,69	2,21	2,54	1,26	1,38
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	2,54	2,92	1,55	1,69	2,89	3,06	2,77	2,87	0,97	0,99	1,79	1,89	0,85	0,91
3. Angkutan Laut	1,56	1,98	2,35	2,72	0,46	0,54	0,85	0,82	1,18	2,14	4,04	5,27	3,91	5,03
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeber	0,17	0,18	0,15	0,14	0,26	0,34	0,97	0,77	-	-	4,13	4,93	0,89	1,04
5. Angkutan Udara	0,54	0,54	2,64	3,03	1,19	1,74	3,29	3,06	-	0,03	3,87	4,38	1,47	1,48
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,44	0,55	0,45	0,50	0,42	0,51	0,95	1,21	0,14	0,11	0,64	0,76	0,48	0,56
b. Komunikasi	0,14	0,10	0,57	0,33	0,38	0,28	0,41	0,23	0,13	0,11	0,18	0,10	0,79	0,50
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAA	0,44	0,44	0,60	0,66	0,50	0,55	0,81	0,79	0,49	0,75	0,55	0,51	0,33	0,35
a. Bank	0,37	0,43	0,56	0,73	0,39	0,63	0,74	0,83	0,51	0,75	0,32	0,32	0,12	0,14
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,57	0,51	0,51	0,61	0,54	0,49	1,27	1,07	0,13	0,25	1,00	0,88	0,58	0,65
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Real Estat	0,53	0,48	0,94	0,87	0,80	0,67	1,25	1,16	0,86	1,36	1,07	0,97	0,77	0,75
e. Jasa Perusahaan	0,42	0,40	0,19	0,20	0,25	0,24	0,03	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02	0,04
9. JASA-JASA	1,96	2,03	1,19	1,19	1,47	1,42	2,26	2,26	1,44	1,64	2,04	1,93	1,02	0,98
a. Pemerintahan Umum	2,19	2,42	2,24	2,36	2,74	2,69	2,81	3,23	2,99	3,54	3,69	3,75	1,28	1,29
b. Swasta	0,88	0,87	0,15	0,15	0,20	0,23	0,89	0,77	0,06	0,10	0,32	0,27	0,40	0,36
1. Sosial & Kemasyarakatan	0,88	0,84	0,29	0,30	0,12	0,11	1,61	1,41	0,10	0,17	0,77	0,67	0,89	0,83
2. Hiburan & Rekreasi	0,10	0,08	0,17	0,17	0,03	0,02	1,01	0,86	0,08	0,16	0,22	0,16	0,62	0,56
3. Perorangan & Rumah Tangga	0,97	0,97	0,10	0,09	0,25	0,29	0,62	0,51	0,05	0,07	0,15	0,13	0,18	0,18

Sumber: diolah dari data BPS, PDRB Lapangan Usaha dan Statistik Indonesia

Lampiran 2.e				
Location Quotient (LQ) Provinsi-Provinsi di Indonesia				
Tahun 2005 - 2009				
LAPANGAN USAHA	PAPUA BRT		PAPUA	
	2005	2009	2005	2009
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	1,83	1,80	0,92	1,08
a. Tanaman bahan Makanan	0,62	0,66	0,87	1,06
b. Tanaman Perkebunan	1,10	1,17	0,23	0,34
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	0,76	0,87	0,43	0,60
d. Kehutanan	8,36	8,69	2,20	2,57
e. Perikanan	4,49	4,25	1,64	1,67
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,97	1,72	6,65	5,74
a. Pertambangan Minyak Gas Bumi (Migas)	3,24	3,08	-	-
b. Pertambangan Bukan Migas	-	-	20,72	16,04
c. Penggalian	0,72	0,80	0,40	0,62
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0,65	0,71	0,07	0,08
a. Industri Migas	1,99	2,65	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	4,56	5,46	-	-
2. Gas Alam Cair	-	0,33	-	-
b. Industri Bukan Migas	0,28	0,31	0,08	0,09
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,56	0,53	0,25	0,26
a. Listrik	0,56	0,57	0,26	0,30
b. Gas	-	-	-	-
c. Air Bersih	1,10	1,44	0,45	0,58
5. KONSTRUKSI	1,11	1,32	0,69	1,10
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	0,51	0,55	0,27	0,37
a. Perdagangan Besar & Eceran	0,57	0,60	0,29	0,40
b. Hotel	0,22	0,29	0,35	0,52
c. Restoran	0,25	0,30	0,12	0,15
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1,58	1,33	1,01	1,10
a. Pengangkutan	1,07	1,26	0,63	0,92
1. Angkutan Rel	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	1,13	1,30	0,52	0,74
3. Angkutan Laut	2,83	4,00	1,02	1,79
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeber	1,01	1,02	0,62	0,85
5. Angkutan Udara	0,48	0,62	1,30	1,66
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,39	0,48	0,20	0,30
b. Komunikasi	0,73	0,50	0,62	0,58
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAA	0,18	0,21	0,11	0,32
a. Bank	0,14	0,22	0,10	0,52
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,25	0,24	0,19	0,30
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
d. Real Estat	0,28	0,27	0,16	0,22
e. Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,07
9. JASA-JASA	1,07	1,13	0,64	1,00
a. Pemerintahan Umum	1,84	2,09	1,14	1,96
b. Swasta	0,21	0,20	0,11	0,14
1. Sosial & Masyarakat	0,43	0,42	0,19	0,25
2. Hiburan & Rekreasi	0,88	0,90	0,41	0,53
3. Perorangan & Rumah Tangga	0,05	0,04	0,04	0,05

Sumber: diolah dari data BPS. PDRB Lapangan Usaha dan Statistik Indonesia

Lampiran 3.a						
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku						
Tahun 2005 - 2009						
(dalam ribu rupiah)						
No	Provinsi	2005	2006	2007	2008*	2009**
1	Nanggroe Aceh Darussalam	13.946,8	16.697,2	16.831,6	17.124,4	16.215,9
2	Sumatera Utara	11.243,2	12.702,2	14.166,6	16.402,9	17.840,2
3	Sumatera Barat	9.781,6	11.447,3	12.729,2	14.825,3	15.802,8
4	Riau	28.747,3	33.730,7	41.412,5	53.265,0	60.210,8
5	Kepulauan Riau	32.046,8	34.621,4	37.207,5	40.318,7	42.165,7
6	Jambi	8.484,4	9.666,1	11.697,4	14.724,7	15.107,1
7	Sumatera Selatan	11.962,0	13.866,8	15.654,7	18.721,5	18.906,9
8	Kepulauan Bangka Belitung	13.185,3	14.596,6	16.169,7	19.174,1	19.869,4
9	Bengkulu	6.470,8	7.161,6	7.963,3	8.832,9	9.318,2
10	Lampung	5.771,8	6.833,1	8.357,2	10.078,4	11.789,0
11	DKI Jakarta	48.790,6	55.878,4	62.490,3	74.064,9	82.079,9
12	Jawa Barat	9.942,3	11.907,3	13.048,2	14.719,4	15.710,9
13	Banten	9.328,8	10.584,7	11.407,7	12.756,2	13.598,3
14	Jawa Tengah	7.355,2	8.777,1	9.648,7	11.124,1	11.957,7
15	DI Yogyakarta	7.528,6	8.651,6	9.584,1	10.985,2	11.830,1
16	Jawa Timur	11.057,4	12.826,9	14.498,2	16.687,1	18.350,8
17	Bali	9.968,4	10.859,9	12.166,3	14.198,7	16.214,9
18	Nusa Tenggara Barat	6.189,9	6.775,2	7.809,5	8.080,6	9.424,0
19	Nusa Tenggara Timur	3.460,8	3.873,7	4.301,5	4.771,4	5.225,2
20	Kalimantan Barat	8.389,4	9.181,3	10.166,0	11.394,0	12.471,4
21	Kalimantan Tengah	10.653,0	12.245,5	13.771,1	15.767,4	17.366,8
22	Kalimantan Selatan	9.644,5	10.359,9	11.610,9	13.276,2	14.638,3
23	Kalimantan Timur	62.446,4	67.531,1	73.601,2	101.533,7	88.920,1
24	Sulawesi Utara	8.752,4	9.798,0	11.012,0	12.610,0	14.379,5
25	Gorontalo	3.717,4	4.283,8	4.957,5	6.075,6	7.198,1
26	Sulawesi Tengah	7.403,4	8.203,2	9.497,4	11.545,2	12.924,9
27	Sulawesi Selatan	6.913,5	8.018,8	8.996,0	10.908,8	12.632,5
28	Sulawesi Barat	4.487,1	5.118,7	6.091,1	7.535,0	8.276,7
29	Sulawesi Tenggara	6.673,3	7.680,5	8.837,3	10.700,3	12.111,6
30	Maluku	3.613,8	3.958,1	4.377,0	4.747,1	5.277,4
31	Maluku Utara	2.825,8	3.033,5	3.346,4	4.018,7	4.808,0
32	Papua	22.543,7	23.744,4	27.475,9	26.365,7	31.777,1
33	Papua Barat	11.499,3	12.741,1	14.479,4	17.081,8	19.557,1
	Total	12.144,4	13.999,3	15.669,7	18.386,3	19.786,3
Sumber: BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010						
Catatan:						
*)	Angka Sementara					
**)	Angka sangat sementara					

Lampiran 3.b						
PDRB per Kapita Tanpa Migas atas Dasar Harga Berlaku						
Tahun 2005 - 2009						
(dalam ribu rupiah)						
No	Provinsi	2005	2006	2007	2008*	2009**
1	Nanggroe Aceh Darussalam	8.681,1	10.464,6	11.771,0	12.620,9	13.188,7
2	Sumatera Utara	11.157,7	12.608,0	14.054,1	16.265,9	17.698,3
3	Sumatera Barat	9.781,6	11.447,3	12.729,1	14.825,3	15.802,8
4	Riau	16.349,7	19.143,1	23.079,3	28.737,9	33.769,1
5	Kepulauan Riau	29.255,3	31.425,9	34.044,4	37.061,2	38.977,4
6	Jambi	6.943,9	8.189,4	9.552,0	11.215,3	12.614,0
7	Sumatera Selatan	7.735,8	9.179,1	10.670,3	12.464,1	13.586,9
8	Kepulauan Bangka Belitung	12.593,5	14.027,3	15.694,8	18.662,0	19.374,5
9	Bengkulu	6.470,8	7.161,6	7.963,3	8.832,9	9.318,2
10	Lampung	5.560,2	6.636,6	8.160,1	9.881,0	11.688,1
11	DKI Jakarta	48.570,2	55.609,2	62.199,5	73.712,7	81.745,4
12	Jawa Barat	9.468,4	11.279,8	12.433,8	13.987,4	15.120,8
13	Banten	9.328,8	10.584,7	11.407,7	12.756,2	13.598,3
14	Jawa Tengah	6.372,0	7.564,7	8.419,2	9.542,9	10.415,7
15	DI Yogyakarta	7.528,6	8.651,6	9.584,1	10.985,2	11.830,1
16	Jawa Timur	11.032,8	12.796,3	14.456,1	16.635,4	18.285,3
17	Bali	9.968,4	10.859,9	12.166,3	14.198,7	16.214,9
18	Nusa Tenggara Barat	6.189,9	6.775,2	7.809,5	8.080,6	9.424,0
19	Nusa Tenggara Timur	3.460,8	3.873,7	4.301,5	4.771,4	5.225,2
20	Kalimantan Barat	8.389,4	9.181,3	10.166,0	11.394,0	12.471,4
21	Kalimantan Tengah	10.653,0	12.245,5	13.771,1	15.767,4	17.366,8
22	Kalimantan Selatan	9.489,4	10.202,1	11.438,4	13.094,6	14.458,4
23	Kalimantan Timur	23.589,9	27.824,2	32.401,4	43.166,3	47.816,1
24	Sulawesi Utara	8.743,6	9.785,7	10.998,8	12.595,3	14.361,8
25	Gorontalo	3.717,4	4.283,8	4.957,5	6.075,6	7.198,1
26	Sulawesi Tengah	7.376,0	8.100,4	9.303,9	11.273,7	12.629,3
27	Sulawesi Selatan	6.896,2	7.999,5	8.974,6	10.886,1	12.607,6
28	Sulawesi Barat	4.487,1	5.118,7	6.091,1	7.535,0	8.276,7
29	Sulawesi Tenggara	6.673,3	7.680,5	8.837,4	10.700,3	12.111,6
30	Maluku	3.598,6	3.942,3	4.364,6	4.733,6	5.262,6
31	Maluku Utara	2.825,8	3.033,5	3.346,4	4.018,7	4.808,0
32	Papua	22.543,7	23.744,4	27.475,9	26.365,7	31.777,1
33	Papua Barat	7.887,1	9.069,4	10.404,5	11.964,1	13.726,9
	Total	10.828,7	12.516,2	14.071,5	16.276,8	17.954,0
Sumber: BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010						
Catatan:						
*)	Angka Sementara					
**)	Angka sangat sementara					

Lampiran 3.c						
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000						
Tahun 2005 - 2009						
(dalam ribu rupiah)						
No	Provinsi	2005	2006	2007	2008*	2009**
1	Nanggroe Aceh Darussalam	8.886,5	8.872,8	8.519,1	7.938,1	7.375,5
2	Sumatera Utara	7.078,3	7.393,3	7.775,4	8.140,6	8.420,6
3	Sumatera Barat	6.384,5	6.681,0	7.006,0	7.349,8	7.552,8
4	Riau	16.395,6	10.832,4	17.001,2	17.553,0	17.663,0
5	Kepulauan Riau	23.756,0	24.302,2	24.922,0	25.478,0	25.290,6
6	Jambi	4.761,5	4.956,5	5.205,7	5.486,5	5.741,5
7	Sumatera Selatan	7.282,0	7.547,8	7.872,1	8.153,2	8.369,0
8	Kepulauan Bangka Belitung	8.101,3	8.300,7	8.552,0	8.810,0	8.995,8
9	Bengkulu	3.983,8	4.154,0	4.352,9	4.497,2	4.608,6
10	Lampung	4.147,8	4.293,2	4.485,0	4.656,2	4.826,6
11	DKI Jakarta	33.205,2	34.837,1	36.733,1	38.671,2	40.268,8
12	Jawa Barat	6.203,9	6.479,7	6.798,6	7.091,7	7.292,0
13	Banten	6.405,7	6.634,3	6.902,7	7.165,1	7.363,1
14	Jawa Tengah	4.488,1	4.690,0	4.913,8	5.142,8	5.345,7
15	DI Yogyakarta	5.024,8	5.157,3	5.325,8	5.538,1	5.725,9
16	Jawa Timur	7.027,5	7.392,9	7.800,8	8.220,1	8.586,9
17	Bali	6.187,9	6.443,8	6.752,4	7.082,1	7.386,1
18	Nusa Tenggara Barat	3.659,5	3.696,9	3.813,4	3.849,9	4.129,5
19	Nusa Tenggara Timur	2.305,7	2.376,0	2.450,6	2.520,0	2.578,3
20	Kalimantan Barat	5.830,4	6.029,6	6.284,7	6.515,0	6.714,7
21	Kalimantan Tengah	7.125,2	7.430,2	7.767,3	8.129,8	8.458,2
22	Kalimantan Selatan	7.065,6	7.306,6	7.631,6	7.990,0	8.271,7
23	Kalimantan Timur	32.537,1	32.689,2	32.526,6	33.316,1	33.333,5
24	Sulawesi Utara	5.944,8	6.222,0	6.559,5	6.987,5	7.465,2
25	Gorontalo	2.165,7	2.294,4	2.435,9	2.592,7	2.754,9
26	Sulawesi Tengah	5.083,1	5.383,0	5.710,7	6.047,2	6.400,4
27	Sulawesi Selatan	4.862,9	5.117,5	5.367,6	5.707,8	5.982,7
28	Sulawesi Barat	3.151,8	3.317,1	3.509,2	3.751,5	3.918,9
29	Sulawesi Tenggara	4.126,5	4.347,3	4.593,5	4.824,4	5.083,6
30	Maluku	2.576,9	2.680,5	2.790,7	2.867,4	2.980,8
31	Maluku Utara	2.447,0	2.593,6	2.648,7	2.762,4	2.882,3
32	Papua	11.479,4	9.317,6	9.525,8	9.263,8	10.930,5
33	Papua Barat	7.711,9	7.903,3	8.288,2	8.725,6	9.098,7
	Total	7.688,0	7.981,9	8.326,1	8.682,6	8.974,7
Sumber: BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010						
Catatan:						
*)	Angka Sementara					
**)	Angka sangat sementara					

Lampiran 3.d						
PDRB per Kapita Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000						
Tahun 2005 - 2009						
(dalam ribu rupiah)						
No	Provinsi	2005	2006	2007	2008*	2009**
1	Nanggroe Aceh Darussalam	5.517,8	5.842,6	6.160,9	6.174,0	6.313,6
2	Sumatera Utara	7.025,3	7.342,0	7.720,3	8.083,8	6.367,1
3	Sumatera Barat	6.384,5	6.681,0	7.006,0	7.349,8	7.552,8
4	Riau	6.930,8	7.352,6	7.773,8	8.208,8	8.543,9
5	Kepulauan Riau	22.331,5	22.942,0	23.646,9	24.303,1	24.156,8
6	Jambi	4.173,8	4.445,4	4.658,7	4.919,3	5.173,4
7	Sumatera Selatan	5.328,4	5.633,4	5.998,0	6.258,4	6.510,5
8	Kepulauan Bangka Belitung	7.799,6	8.055,0	8.364,5	8.643,7	8.846,5
9	Bengkulu	3.983,8	4.154,0	4.352,9	4.497,2	4.608,6
10	Lampung	4.068,8	4.224,5	4.421,5	4.593,5	4.773,1
11	DKI Jakarta	33.102,2	34.733,2	36.629,7	38.568,4	40.171,2
12	Jawa Barat	5.977,2	6.260,2	6.591,6	6.884,9	7.073,2
13	Banten	6.405,7	6.634,3	6.902,7	7.165,1	7.363,1
14	Jawa Tengah	4.190,9	4.378,7	4.604,1	4.812,8	5.026,3
15	DI Yogyakarta	5.024,8	5.157,3	5.325,8	5.538,1	5.725,9
16	Jawa Timur	7.010,2	7.374,2	7.776,3	8.190,8	8.551,5
17	Bali	6.187,9	6.443,8	6.752,4	7.082,1	7.386,1
18	Nusa Tenggara Barat	3.659,5	3.696,9	3.813,4	3.849,9	4.129,5
19	Nusa Tenggara Timur	2.305,7	2.376,0	2.450,6	2.520,0	2.578,3
20	Kalimantan Barat	5.830,4	6.029,6	6.284,7	6.515,0	6.714,7
21	Kalimantan Tengah	7.125,2	7.430,2	7.767,3	8.129,8	8.458,2
22	Kalimantan Selatan	6.928,7	7.170,1	7.493,7	7.855,4	8.140,0
23	Kalimantan Timur	14.713,0	16.187,0	17.434,8	18.084,5	18.808,0
24	Sulawesi Utara	5.936,0	6.211,1	6.548,0	6.975,2	7.450,9
25	Gorontalo	2.165,7	2.294,4	2.435,9	2.592,7	2.754,9
26	Sulawesi Tengah	5.065,3	5.334,1	5.620,3	5.932,4	6.279,3
27	Sulawesi Selatan	4.851,6	5.106,2	5.356,0	5.695,9	5.969,9
28	Sulawesi Barat	3.151,8	3.317,1	3.509,2	3.751,5	3.918,9
29	Sulawesi Tenggara	4.126,5	4.347,3	4.593,5	4.824,4	5.083,6
30	Maluku	2.565,1	2.668,7	2.781,6	2.858,1	2.971,4
31	Maluku Utara	2.447,0	2.539,6	2.648,7	2.762,4	2.882,3
32	Papua	11.479,4	9.317,6	9.525,8	9.623,8	10.930,5
33	Papua Barat	5.690,1	5.987,8	6.377,2	6.798,0	7.162,3
	Total	7.000,7	7.315,1	7.694,1	8.049,4	8.364,4
Sumber: BPS. Statistik Indonesia 2008, 2009, dan 2010						
Catatan:						
*)	Angka Sementara					
**)	Angka sangat sementara					

LAMPIRAN
BIODATA PENELITIAN

I IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yusi Yusianto, SE, ME (L)
1.2.	Jabatan Fungsional	Lektor
1.3.	NIP/NIK/No. identitas lainnya	10198017
1.4.	Tempat dan Tanggal Lahir	California, USA / 13-12-1964
1.5.	Alamat Rumah	Jl. Daksinapati Timur C/18. Rawamangun. Jakarta Timur.
1.6.	Nomor Telepon/Fax	021-4892449
1.7.	Nomor HP	0818191489
1.8.	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi - Universitas Tarumanagara Jl. Tanjung Duren Utara No. 1. Jakarta
1.9.	Nomor Telepon/Fax	021-5655507/08/09/10 Ext. 0625
1.10.	Alamat e-mail	ucucanto@gmail.com
1.11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= orang; S2= orang; S3= orang
1.12.	Mata Kuliah yang sedang/pernah diampu	
		1. Manajemen Perbankan
		2. Bank & Lembaga Keuangan
		3. Pengetahuan Pasar Modal
		4. Etika Bisnis
		5. Perekonomian Indonesia
		6. Manajemen Investasi
		7. Pengantar Manajemen
		8. Ekonomi Internasional
		9. Ekonomi Pembangunan
		10. Pengantar Bisnis.
		11. Kebijakan Fiskal & Moneter

II RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1.	Program:	S1	S2	S3
2.2.	Nama PT	Univ. Sebelas Maret (UNS)	Univ. Indonesia	
2.3.	Bidang Ilmu	Ekonomi	Ekonomi	
2.4.	Tahun Masuk	1983	1988	
2.5.	Tahun Lulus	1988	1991	
2.6.	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1969-1983	Analisis Struktur Industri Pengolahan Melalui Pendekatan Dekomposisi Pertumbuhan di Indonesia	
2.7.	Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Suharno TS, SU.	Prof. Iwan J. Azis, Ph.D.	

III PENGALAMAN PENELITIAN (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2011	Identifikasi Ekonomi Sosial Kecamatan Juwana, Pati	LPKM – Untar	10.790.000

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2009	Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)	Dikti	75.000.000
2	2009	Identifikasi Golongan Darah di RW 016, Kelurahan Tomang, Jakarta Barat	LPKM – Untar	25.000.000
3	2009	Mengadakan pengetikan ulang buku untuk tuna netra	LPKM – Untar	
4	2009	Sekretariat Koordinator Pemantauan Ujian Nasional Tingkat SMP, SMK, dan SMA/MA Tahun 2009 di Wilayah Jakarta Barat	UNJ	
5	2010	Pengembangan Desa Tertinggal Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo	LPKM – Untar	97.975.000
6	2010	Sekretariat Koordinator Pemantauan & Pengawasan Ujian Nasional Tingkat SMP, SMK, SMA/MA Nasional Tahun 2010 di Wilayah Jakarta Barat	UNJ	
7	2010 - sekarang	Pembina Lingkungan RW 016, Kelurahan tomang, Jakarta Barat	LPKM	
8	2011	Sekretariat Koordinator Pengawasan Ujian Nasional Tingkat SMK dan SMA Tahun 2011 di Wilayah Jakarta Barat	UNJ	

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (Tidak termasuk Makalah Seminar/ Proceedings, Artikel di Surat Kabar)

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2000	Neraca Pembayaran 1980-1998: Suatu Catatan		Jurnal Manajemen
2	2000	Purchasing Power Parity (PPP)	III / 4	Publikasi FE Untar
3	2001	Penetapan Target Inflasi sebagai Suatu Alternatif Kerangka Kebijakan Moneter: Suatu Pengantar	VI / 01	Jurnal Ekonomi

4	2001	Transaksi Forward dalam Pasar Valuta Asing: Suatu Catatan	V / 2	Jurnal Manajemen
5	2001	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000: Suatu Catatan		Jurnal Ekonomi
6	2005	Neraca Pembayaran Tahun 2004: Suatu Catatan / 2	Jurnal Ekonomi
7	2006	Kebijakan Nilai Tukar dan Implementasinya di Indonesia / 1	Jurnal Ekonomi

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2008	Laporan Tim Penjajakan Restrukturisasi Organisasi Universitas Tarumanagara		Lembaga Manajemen Mutu – Universitas Tarumanagara

VII. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	2010	Pedoman Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Kementerian Perumahan Rakyat	Baik

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Jakarta, 20 Juni 2011

Pengusul,

(Yusi Yusianto, SE.,ME)

BIODATA ANGGOTA PENGUSUL

I IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Keni, SE, MM (L)
1.2.	Jabatan Fungsional	Lektor
1.3.	NIP/NIK/No. identitas lainnya	10199028
1.4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjungpinang / 8-11-1975
1.5.	Alamat Rumah	Perumahan Citra 2 Blok O 11 No. 10 Kalideres Jakarta Barat 11830
1.6.	Nomor Telepon/Fax	021-54376189
1.7.	Nomor HP	081807302521
1.8.	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi - Universitas Tarumanagara Jl. Tanjung Duren Utara No. 1. Jakarta
1.9.	Nomor Telepon/Fax	021-5655507/08/09/10 Ext. 0625
1.10.	Alamat e-mail	inek529@hotmail.com
1.11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 50 orang; S2= orang; S3= orang
1.12.	Mata Kuliah yang sedang/pekerjaan diampu	
		1. Statistika I
		2. Statistika II
		3. Teknik Proyeksi Bisnis
		4. Penganggaran Perusahaan
		5. Metode Penelitian

II RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1.	Program:	S1	S2	S3
2.2.	Nama PT	Universitas Tarumanagara	Universitas Tarumanagara	-
2.3.	Bidang Ilmu	Manajemen	Manajemen	-
2.4.	Tahun Masuk	1994	1998	-
2.5.	Tahun Lulus	1998	2000	-
2.6.	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi		Analisis Atribut- Atribut Kepuasan Pelanggan Kartu Prabayar Simpati Nusantara di Jakarta	-
2.7.	Nama Pembimbing/Promotor		DR. Yos E. Susanto, MA, MPH	-

III PENGALAMAN PENELITIAN (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2001	Relevansi Kurikulum Program D.III Manajemen Perpajakan dengan Kebutuhan di Dunia Kerja (Bersama: Mimi S.A. dan Franky Slamet)	UNTAR	Rp 3.370.000,-

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2011	Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan Ujian Nasional SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 DKI Jakarta	UNJ	

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (Tidak termasuk Makalah Seminar/ Proceedings, Artikel di Surat Kabar)

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2000	Pentingnya Pengukuran Kepuasan Pelanggan Bagi Perusahaan	TH. IV/02/Juni/2000	Jurnal Manajemen
2	2002	Relevansi Kurikulum D-III Manajemen Keuangan/Perpajakan dengan Kebutuhan di Lapangan Kerja – Bersama Mimi S.A., Franky Slamet	Vol. 4 No. 2 Desember 2002	Akademika
3	2008	Pengaruh Imbal Hasil Pasar Saham Dan Beberapa Indikator Makro Ekonomi Tertentu Terhadap Imbal Hasil Saham Perusahaan Sektor Barang Konsumsi (Suatu Penelitian Empiris di Bursa Efek Jakarta) – Bersama Indra Widjaja, Joyce Turangan	Tahun XIII/01/2008	Jurnal Ekonomi
4	2008	Analisis Manfaat Rasio-Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Industri Kimia – Bersama Sofia Prima Dewi	Tahun XII/01/Januari/2008	Jurnal Akuntansi
5	2008	Pengaruh Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta	Tahun XII/02/Mei/2008	Jurnal Akuntansi
6	2008	Peranan Partisipasi Penyusunan	Tahun	Jurnal

		Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja – Sofia Prima Dewi	XII/02/Juni/2008	Manajemen
--	--	--	------------------	-----------

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
		-		

VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor Pendaftaran/Sertifikat
		-		

VIII. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
		-		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Jakarta, 17 Juni 2011

Pengusul,

(Keni, SE.,MM.)

DRAFT JOURNAL

**ANALISIS DISPARITAS PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL
DI INDONESIA
TAHUN 2005 – 2009**

Yusi Yusianto dan Keni

Abstract: This paper analyzes provincial economic growth in Indonesia from 2005 to 2009. It shows that provinces that low GRDP per capita in 2005 can growth faster than high GRDP per capita. From four types of GRDP data, only GRDP in constant price 2000 year that shows significant statistically. It is shown in Baumol and absolute (unconditional) β convergence measurement result.

The σ -convergence calculation shows that although dispersion rate still higher than 2006 year, but its trend tends to decline during 2005-2009. Therefore, increase GRDP per capita during 2005-2009 year is accompanied by disparity rate decline. But the research shows also that σ -convergence is not appropriate with Williamson index calculation result.

Key words: GRDP, province, disparity, convergence

I. PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Meskipun indikator pembangunan ekonomi nasional suatu negara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, namun apabila pertumbuhan tersebut disertai dengan ketimpangan antar daerah yang tinggi maka pembangunan tersebut akan mengalami masalah. Masalah tersebut tidak hanya berasal dari aspek ekonomi, juga dari aspek non ekonomi seperti sosial, politik, dan keamanan. Pada gilirannya, masalah-masalah tersebut akan mengganggu pembangunan ekonomi suatu negara.

Pada hakekatnya, Indonesia sudah memasukkan prinsip desentralisasi dalam perencanaan pembangunannya. Hal tersebut terlihat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pembangunan ekonomi Indonesia sejak awal 1970-an hingga tiga dekade cenderung dilaksanakan secara tersentralisasi. Pemerintah Pusat mengendalikan penuh keputusan pembangunan, dan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana. Oleh karenanya, ketika ketidakmerataan antar daerah mengemuka, maka itu dipahami sebagai masalah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tuntutan atas pengaturan kembali hubungan Pusat dan Daerah semakin kuat ketika masa kepresidenan Orde Baru (Suharto) berakhir. (Nazara: 2010)

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya kedua UU tersebut direvisi dengan UU No 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberlakuan UU tersebut memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintahan daerah untuk mengelola pembangunan di daerahnya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, Indonesia terdiri dari 26 provinsi (setelah Timor-Timur keluar), namun setelah pemberlakuan otonomi daerah menjadi 30 provinsi (tahun 2000) dan, terakhir, 33 provinsi (sejak tahun 2005). Konsekuensinya, jumlah Kabupaten dan kecamatan meningkat. Jumlah kabupaten meningkat dari 268 kabupaten pada tahun 2000 menjadi 339 kabupaten pada tahun 2009; sedangkan jumlah kecamatan meningkat dari 4.049 kecamatan (tahun 2000) menjadi 6.651 kecamatan (tahun 2009).

Dapat dibayangkan seberapa besar uang yang sudah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pendirian lembaga pemerintahan daerah yang baru tersebut, yang sebenarnya belum langsung menyentuh sektor produksi dan peningkatan daya saing daerah tersebut.

Krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi -13,1 % pada tahun 1998 dan 0,8 % pada tahun 1999. Selanjutnya, pada kurun 2000-2009, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 5,3 % per tahun. Pertumbuhan tersebut, apabila merujuk pada data World Bank, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang sekitar 2,9 % per tahun dan negara maju yang sekitar 2,0 % per tahun. Sehubungan dengan itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah kinerja ekonomi nasional yang relatif baik tersebut disertai dengan perkembangan yang relatif merata pada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Mengingat, sejak tahun 2005, Indonesia terdiri dari 33 provinsi serta data PDRB terakhir saat ini adalah tahun 2009, maka jangka waktu penelitian yang dipilih adalah tahun 2005 hingga tahun 2009. Dalam kurun waktu tersebut akan dilihat posisi provinsi-provinsi di Indonesia menurut PDRB dan PDRB per kapitanya serta pertumbuhan ekonomi provinsi masing-masing. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2005-2009 disertai dengan pola pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang cenderung mengalami konvergensi (*convergence*) atau tidak. Apabila pola pertumbuhannya bersifat konvergen, maka daerah-daerah yang PDRB-nya relatif rendah dapat mengejar daerah-daerah yang PDRB-nya relatif tinggi dan disparitas pertumbuhan antar daerah dapat berpeluang (bukan otomatis) menjadi berkurang karena daerah-daerah yang produk domestik regional bruto per kapita (PDRB/kapita)-nya relatif rendah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada daerah-daerah yang PDRB/kapita-nya relatif tinggi.

I.B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang, maka perumusan masalah adalah:

4. Daerah-daerah mana saja di Indonesia dalam periode 2005 – 2009 yang masuk kelompok daerah yang memiliki PDRB per kapita di atas dan di bawah PDRB per kapita nasional?
5. Daerah-daerah mana saja di Indonesia dalam periode 2005 – 2009 yang masuk kelompok daerah yang memiliki pertumbuhan PDRB per kapita di atas dan di bawah PDRB per kapita nasional?
6. Apakah pola pertumbuhan PDRB per kapita antar daerah di Indonesia dalam periode 2005 – 2009 cenderung konvergen?

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.A. Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pertumbuhan

Untuk menilai kesejahteraan suatu negara biasanya digunakan indikator PDB per kapita, maka untuk menilai kesejahteraan suatu daerah digunakan indikator PDRB per kapita. Selanjutnya, untuk menilai kinerja kesejahteraan suatu negara biasanya digunakan pertumbuhan PDB per kapita; sedangkan kinerja kesejahteraan suatu daerah dapat dinilai dengan menggunakan pertumbuhan PDRB per kapita. Membandingkan antara PDRB per kapita dan pertumbuhan PDRB per kapita suatu daerah dengan PDB per kapita dan pertumbuhan PDB per kapita dapat digunakan untuk menilai apakah kinerja kesejahteraan suatu daerah lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari pemerintah pusat atau rata-rata nasional. Namun, perlu juga disadari bahwa penggunaan PDB per kapita dan PDRB per kapita sebagai pengukur kesejahteraan suatu negara dan daerah bersifat kasar dan mengandung masalah karena masih banyak aspek ekonomi kesejahteraan yang belum dimasukkan dalam PDB dan PDRB (Weil (2009) dan Stiglitz, dkk (2011)).

Sehubungan dengan proses pertumbuhan ekonomi, Kuznets, sebagaimana dikutip oleh Barro & Martin (1995), menjelaskan karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah pembangunan ekonomi yang disertai dengan tingkat transformasi struktural yang cepat, yang meliputi pergeseran kontribusi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Pergeseran kontribusi sektor produksi tersebut juga disertai proses urbanisasi, pergeseran dari status pekerja rumah tangga (di rumah) ke status pekerja, peningkatan peran pendidikan formal, kenaikan peranan perdagangan luar negeri dan kemajuan teknologi

yang berimplikasi pada penurunan ketergantungan pada sumber daya alam. Di balik itu, peran pemerintah meningkat dalam aktivitas ekonomi serta menyediakan infrastruktur.

Sebagaimana pernyataan Kuznets tersebut, proses pembangunan biasanya disertai dengan transformasi atau pergeseran struktur produksi. Transformasi tersebut dapat membawa pada juga ditentukan oleh potensi yang bisa dijadikan sebagai basis pertumbuhan suatu daerah. Dalam analisis regional, basis pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat melalui indikator *Location Quotient* atau LQ (Rustiadi dkk (2009) dan Daryanto & Hafizrianda (2010)). LQ merupakan indikator sederhana untuk melihat potensi suatu sektor dengan cara membandingkan peran suatu sektor dalam suatu daerah dengan peran sektor tersebut dalam daerah di tingkat atasnya atau daerah yang dijadikan sebagai referensi. Apabila $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi penggerak utama daerah untuk memproduksi dan mengekspor produknya ke luar daerah dan, bahkan, ke luar negeri. Apabila $LQ = 1$ dan $LQ < 1$, maka sektor tersebut bukan merupakan basis penggerak utama daerah tersebut. Apabila $LQ < 1$, maka sektor tersebut lebih banyak mengimpor dari daerah lain dan/atau luar negeri. Formula LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ir} = \frac{X_{ir}/X_r}{X_{in}/X_n} \dots\dots\dots(2.1)$$

Ketrangan:

- X_{ir} = nilai tambah sektor i di daerah r
- X_r = total nilai tambah daerah r
- X_{in} = nilai tambah sektor i nasional
- X_n = total nilai tambah nasional

Nazara (2010) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya didominasi oleh beberapa daerah saja. Sebagai contoh dikemukakan bahwa 39% PDB Thailand berada di sekitar Bangkok, dan sekitar 60% PDB Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan pendapatan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Ketimpangan pendapatan berhubungan dengan disparitas dalam distribusi pendapatan, yakni kesenjangan (*gap*) antara yang kaya dan yang miskin di suatu negara. Shin (2008) mengemukakan bahwa tidak mungkin untuk menyatakan dengan mudah mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Dalam awal tulisannya tersebut, ia mengumpulkan berbagai literatur yang membahas mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan

Hubungan	Penulis
Negatif	Murphy dkk (1989), Perotti (1993), Alesina dan Rodrik (1994), Persson dan Tabellini (1994), Perotti (1996), Alesina dan Perotti (1996), Acemoglu (1997), Helpman (2004), Tachibanaki (2005), Sukiassyan (2007)
Positif	Okun (1975), Bourguignon (1990), Benabon (1996), Li dan Zou (1998), Aghion dan Howitt (1998), Forbes (2000)
U terbalik	Chen (2003)
Tidak unit atau tidak konklusif	Amos (1988), Barro (2000), Banerjee dan Duflo (2003), Weil (2005), Shin dkk (2009)

Sumber: Shin (2008)

Pada tahun 1955, Kuznets, sebagaimana dikutip dalam Shin (2008) dan Weil (2009), membuat hipotesis mengenai hubungan antara tahap pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada tahap awal pembangunan, kenaikan pendapatan per kapita disertai dengan kenaikan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, pada tahap pembangunan yang sudah mapan, peningkatan pendapatan per kapita disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Hipotesis Kuznets tersebut apabila dibuat gambar, dengan sumbu horizontal merupakan pendapatan per kapita dan sumbu vertikal merupakan tingkat ketimpangan pendapatan yang didekati dengan koefisien Gini (*Gini coefficient*), maka gambarnya akan berbentuk kurva U terbalik (*inverted U-shaped*). Kurva tersebut dikenal sebagai kurva Kuznets (*Kuznets curve*).

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah. Williamson (Rustiadi dkk (2009) dan Daryanto & Hafizrianda (2010)) mengembangkan indeks kesenjangan wilayah yang diformulasikan sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 P_i}}{\bar{Y}} \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan:

V_w = Indeks kesenjangan Williamson

Y_i = PDRB per kapita daerah i

\bar{Y} = rata-rata PDRB per kapita seluruh daerah

$P_i = f_i/n$, di mana f_i adalah jumlah penduduk daerah i dan n adalah total penduduk seluruh daerah

Pengukuran disparitas tersebut didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar wilayah yang berupa besaran PDRB. Kriteria pengukurannya adalah jika indeks = 0, berarti tidak terdapat kesenjangan ekonomi antar daerah; semakin besar nilai indeks, semakin besar

tingkat perbedaan ekonomi antarwilayah dengan rata-ratanya; semakin kecil nilai indeks, semakin menunjukkan pemerataan antarwilayah yang lebih baik.

II.B. Konvergensi

Penelitian teoritis mengenai konvergensi telah dimulai sejak paper Solow dan Swan pada tahun 1956 (Barro & Martin (1995), Roemer (1996), Perkins, et.al (2001), Chi (2005), Potipiti (2009), Weil (2009), dan Dowling & Velenzuela (2010)). Bagi ekonom yang mempelajari pertumbuhan ekonomi suatu negara, penelitian ini sangat menarik karena mencoba menjawab mengenai apakah mungkin bagi negara-negara miskin untuk bisa mengejar negara-negara kaya sehingga, pada gilirannya, disparitas perekonomian di antara kedua jenis negara tersebut menjadi lebih sempit atau cenderung menyatu.

Weil (2009) menilai bahwa meskipun model Solow kurang mampu menjelaskan latar belakang mengapa terdapat perbedaan yang besar dalam tingkat pertumbuhan antar negara di dunia serta prospek negara yang sudah mencapai *steady state*, namun model tersebut masih mampu menjelaskan serta memprediksi tingkat pertumbuhan relatif (*relative growth rates*) – yakni, mengapa beberapa negara tumbuh lebih cepat daripada negara lainnya ketika negara-negara tersebut belum mencapai *steady state*-nya.

Penelitian empiris mengenai konvergensi mulai muncul pada tahun 1986. Baumol merupakan orang pertama yang menguji secara empiris hipotesis konvergensi. Baumol menggunakan regresi sederhana (*simple regression*) berdasarkan data 16 negara industri yang dikumpulkan oleh Maddison untuk menguji apakah terdapat korelasi negatif antara tingkat pertumbuhan dan tingkat pendapatan awal negara-negara tersebut. Ia menemukan terjadi konvergensi antar kelompok Negara-negara industri tersebut. (Roemer (1996) dan Potipiti (2009))

Adapun bentuk persamaan regresi yang dibuat Baumol (Roemer (1996)):

$$\ln [(Y/N)_{i,1979}] - \ln [(Y/N)_{i,1870}] = a + b \ln[(Y/N)_{i,1870}] + \varepsilon_i \dots \dots \dots (2.3)$$

Keterangan:

- $\ln(Y/N)$ adalah log pendapatan per kapita
- ε adalah *error term*
- i adalah indeks Negara

Menurut persamaan (2.3), konvergensi terjadi apabila b bertanda negative ($b < 0$): Negara-negara yang pendapatan awalnya lebih tinggi akan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah

daripada Negara-negara yang pendapatan awalnya lebih rendah. Nilai $\mathbf{b} = -1$ berhubungan dengan *perfect convergence*, sedangkan nilai $\mathbf{b} = 0$ berarti bahwa pertumbuhan tidak berhubungan dengan pendapatan awal dan tidak ada *convergence*.

Hasil pengujian Baumol adalah:

$$\ln [(Y/N)_{i,1979}] - \ln [(Y/N)_{i,1870}] = 8.457 - 0.995 \ln[(Y/N)_{i,1870}] \dots\dots\dots(2.4)$$

(0.094)

$$R^2 = 0.87 \quad \text{s.e.e} = 0.15$$

Angka dalam kurung, 0.094, merupakan *standard error of the regression coefficient*.

Hasil regresi pada persamaan 2.4 menunjukkan hampir terjadi *perfect convergence* karena estimasi \mathbf{b} hampir sama dengan -1.

Hingga sekarang penelitian Baumol tetap menarik perhatian dalam membahas pertumbuhan ekonomi untuk melihat apakah Negara miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada Negara kaya. Meskipun demikian, sebagaimana dikutip oleh Roemer (1996), Bradford De Long pada tahun 1988 mengkritisi hasil penelitian Baumol tersebut. De Long mengkritik pemilihan sampel yang diambil dan pengukuran datanya terutama yang berasal dari tahun 1870.

Sejak itu, berbagai penelitian empiris mengenai konvergensi mulai berkembang, tidak hanya diaplikasikan untuk menilai pola perkembangan antar negara di tingkat internasional juga antar daerah di tingkat nasional. Hasilnya, terjadi perdebatan berkenaan dengan penilaian apakah pertumbuhan ekonomi internasional dan atau pertumbuhan ekonomi regional suatu negara mengalami konvergensi atau tidak dalam kurun waktu tertentu (Chi, 2005).

Secara garis besar, terdapat dua konsep konvergensi yang muncul dalam diskusi pertumbuhan ekonomi lintas negara atau daerah (Barro & Martin (1995)):

3. Konvergensi terjadi apabila Negara yang miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada Negara yang kaya sehingga Negara miskin cenderung mengejar Negara kaya dalam tingkat pendapatan atau produk perkapita-nya. Ini berhubungan dengan konsep “ β convergence”.
4. Konvergensi terjadi jika dispersi – misalnya, yang diukur oleh deviasi standar logaritma pendapatan atau produk per kapita lintas kelompok Negara atau daerah – cenderung turun. Ini disebut sebagai proses “ σ convergence” – yang memusatkan perhatian pada dispersi *cross sectional*.

Konsep β *convergence* yang dibuat oleh Baumol saat ini lebih dikenal sebagai *absolute β convergence*. Pada dasarnya, *absolute β convergence* menggambarkan tendensi daerah miskin yang mengejar pertumbuhan ekonomi daerah kaya (Villaverde dan Maza, 2009). Selain bentuk

persamaan yang diperkenalkan Baumol, persamaan *absolute* β *convergence* juga sering ditemui dalam berbagai tulisan berbentuk sebagai berikut:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \log\left(\frac{y_{iT}}{y_{i0}}\right) = c + \beta \log(y_{i0}) + \mu_i \dots\dots\dots(2.5)$$

Nilai c adalah konstanta, $\beta = - (1 - e^{-bT}/T)$ adalah suatu parameter yang mengindikasikan hubungan antara pertumbuhan dan pendapatan awal, b adalah kecepatan konvergensi (*speed of convergence*), y_i berhubungan dengan pendapatan per kapita daerah i , T merupakan periode sampel, dan μ adalah *error term*. Apabila koefisien regresi pada pendapatan per kapita awal (β) bertanda negative, berarti perekonomian negara atau daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada negara atau daerah kaya, maka dikatakan terjadi *absolute* β *convergence*.

Dalam perkembangannya, β *convergence* dibedakan menjadi *absolute (unconditional)* β *convergence* dan *conditional* β *convergence* (Villaverde dan Maza, 2009). Perbedaan antara *absolute (unconditional)* β *convergence*, yang selanjutnya disingkat *absolute* β *convergence*, dan *conditional* β *convergence* berhubungan dengan parameter yang menentukan pendapatan dalam *steady-state*, yakni, situasi di mana berbagai kuantitas tumbuh pada tingkat yang konstan. *Absolute* β *convergence* berdasarkan pada asumsi bahwa yang berbeda hanya pendapatan per kapita tingkat awal, sedangkan *conditional* β *convergence* selain mempertimbangkan pendapatan per kapita tingkat awal juga faktor lain yang dianggap memengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti teknologi, infrastruktur, kecenderungan menabung, bauran industri, dan lain-lain. Persamaan *conditional* β *convergence* diberikan pada persamaan 2.6:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \log\left(\frac{y_{iT}}{y_{i0}}\right) = c + \beta \log(y_{i0}) + \gamma X'_i + \mu_i \dots\dots\dots(2.6)$$

Keterangan:

X'_i merupakan suatu *vector of conditioning variables*.

Konvergensi selain berhubungan dengan β *convergence* juga berhubungan dengan σ *convergence*. σ *convergence* digunakan untuk melihat apakah pola pertumbuhan dalam periode waktu tertentu disertai dengan penurunan dispersi pendapatan per kapita antar negara atau daerah. Sebagai konsep, β *convergence* dan σ *convergence* digunakan bersama dalam literatur yang berhubungan dengan konvergensi. Meskipun berbagai indikator ketimpangan dapat dianggap sebagai suatu pengukuran σ *convergence* (atau *divergence*), beberapa tulisan biasanya menggunakan indikator seperti *variance (standard deviation)* atau *coefficient variation*. (Villaverde & Maza (2009)). *Coefficient variation* (σ) diberikan pada persamaan 2.7:

$$\sigma = s/\bar{y} \dots\dots\dots(2.7)$$

Keterangan:

- s adalah *standard deviation*
- \bar{y} adalah rata-rata pendapatan per kapita.

Perkins dan kawan-kawan (2001) meneliti hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita awal tahun untuk 124 negara pada periode 1965 – 1997 dalam bentuk suatu gambar. Penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan antara kedua variabel tersebut. Gambarnya tidak memberi pola yang jelas. Beberapa Negara miskin telah tumbuh dengan cepat, namun Negara miskin lainnya tumbuh sangat rendah, bahkan negatif. Hal yang sama berlaku pada Negara-negara berpendapatan menengah. Di lain pihak, kebanyakan negara-negara kaya mengalami pertumbuhan yang relatif rendah, sebagaimana yang telah diperkirakan. Hal ini memberi kesimpulan, yakni tidak ada tendensi umum bahwa Negara-negara miskin memimpin pertumbuhan ekonomi dunia. Jika pun ada, hal yang sebaliknya yang terjadi.

Dowling dan Valenzuela (2010) mengungkapkan bahwa hipotesis tersebut memperoleh sedikit dukungan ketika diuji dengan data dari berbagai Negara. Mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan untuk Negara-negara sedang berkembang di Asia dalam kurun waktu 1975-2000 tidak sepenuhnya tergantung pada kondisi awal perekonomian. Dengan kata lain, tidak ada alasan untuk percaya bahwa pendapatan Negara-negara sedang berkembang di Asia akan mengalami konvergensi di masa yang akan datang. Namun, mereka juga menemukan bahwa hipotesis konvergensi tampaknya berlaku pada Negara-negara yang lebih homogen, khususnya pada Negara-negara OECD setelah tahun 1950. Apabila total Negara-negara OECD dibagi dua, negara-negara yang lebih miskin tumbuh lebih dari 1 persen di atas pertumbuhan Negara-negara yang lebih kaya. Apabila total Negara-negara OECD dibagi empat, Negara-negara yang lebih miskin seperempat paling bawah tumbuh lebih dari 2 persen di atas Negara-negara yang seperempat paling atas. Lebih lanjut, dispersi pendapatan turun secara dramatis. Jepang merupakan contoh terbaik yang menunjukkan kemampuannya dalam mengejar pendapatan per kapita Negara seperti Amerika Serikat. Selain itu, negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara cenderung mengalami konvergensi terhadap negara-negara industri. Dalam kurun waktu 1960-1990, seluruh NIEs (*Newly Industrialized Economies*) tumbuh lebih tinggi di atas 3 persen dari rata-rata pertumbuhan Negara-negara OECD. Pada kasus antar daerah di dalam negara, tingkat konvergensi tampak sangat rendah. Misalnya, di Amerika Serikat, Amerika bagian selatan masih lebih miskin daripada bagian Negara lainnya, baik dalam pendapatan per kapita maupun kapital per kapita.

Chi (2005) menggunakan data 30 provinsi di China selama tahun 1978 hingga 2000 meneliti konvergensi di China dengan membagi provinsi-provinsi menjadi tiga kelompok, yakni daerah-

daerah yang sudah maju, daerah yang baru berkembang, dan daerah yang masih tertinggal. Ia memperkenalkan *conditional β -convergence hypothesis*, *absolute β -convergence hypothesis* dan *σ -convergence hypothesis*. Penelitiannya sesuai dengan *conditional β -convergence hypothesis*, namun bertentangan dengan *absolute β -convergence hypothesis* dan *σ -convergence hypothesis*. Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa kebijakan dengan karakter yang heterogen secara regional mengindikasikan cukup berpengaruh pada pola pertumbuhan regional. Penemuan tersebut berbeda dengan prediksi Barro dan Sala-i-Martin yang menganggap bahwa daerah-daerah yang relatif homogen cenderung mendukung ketiga tipe konvergensi.

Kesimpulan mengenai pola pertumbuhan suatu negara atau daerah bersifat konvergen atau divergen atau, bahkan, tidak memiliki pola yang jelas, sangat bermanfaat untuk membantu dalam memprediksi arah perkembangan ekonomi antar negara atau antar daerah. Pada gilirannya, kesimpulan tersebut juga dapat digunakan untuk memprediksi apakah disparitas yang terjadi dapat menurun atau tidak. Di semua negara, terlepas dari ukuran dan tingkat pembangunannya, disparitas pembangunan merupakan masalah pembangunan antar wilayah karena berpotensi dapat menimbulkan masalah-masalah social, keamanan, dan politik. Oleh karenanya, kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Ketimpangan pembangunan inter-regional selain menyebabkan kapasitas pembangunan regional yang sub-optimal, pada gilirannya juga menihilkan potensi pertumbuhan pembangunan makro karena interaksi pembangunan inter-regional tidak sinergis (Rustiadi: 2009).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data sekunder, seperti PDRB dan PDRB per kapita untuk 33 provinsi tahun 2005 – 2009, baik total (migas dan tanpa migas) maupun tanpa migas. Data tersebut diambil dari buku “Produk Domestik Regional Bruto”, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (2009 dan 2011).

Pertimbangan periode penelitian yang dicakup adalah tahun 2005 hingga 2009 adalah, sebagai berikut:

3. Saat ini, Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Data PDRB 33 provinsi baru tersedia pada tahun 2005.
4. Data PDRB paling akhir ketika proposal penelitian ini diajukan adalah tahun 2009.

Teori yang digunakan adalah:

4. Teori basis ekonomi. Teori ini beranggapan bahwa ekspor daerah merupakan faktor penentu dalam pembangunan ekonomi. Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah dapat digunakan metode *location quotient* (LQ).
5. Indeks Williamson, yang digunakan untuk mengetahui disparitas antar wilayah.

6. Teori konvergensi (*convergence*) untuk mengetahui apakah pertumbuhan daerah yang miskin dapat mengejar pertumbuhan daerah yang kaya.

Model atau persamaan yang digunakan:

4. *Location Quotient* (LQ)

Untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi suatu daerah dapat digunakan metode *Location Quotient* (LQ), yang merupakan rasio relatif antara proporsi aktivitas suatu sektor ekonomi suatu daerah terhadap proporsi aktivitas suatu sektor ekonomi total daerah. Formula LQ adalah:

$$LQ_{ir} = \frac{X_{ir}/X_r}{X_{in}/X_n} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

- X_{ir} = nilai tambah sektor i di daerah r
- X_r = total nilai tambah daerah r
- X_{in} = nilai tambah sektor i nasional
- X_n = total nilai tambah nasional

Suatu daerah dianggap memiliki basis aktivitas ekonomi pada sektor yang memiliki nilai LQ di atas 1.

5. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah. Williamson mengembangkan indeks kesenjangan wilayah yang diformulasikan sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 P_i}}{\bar{Y}} \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan:

- V_w = Indeks kesenjangan Williamson
- Y_i = PDRB per kapita daerah i
- \bar{Y} = rata-rata PDRB per kapita seluruh daerah
- P_i = f_i/n, di mana f_i adalah jumlah penduduk daerah i dan n adalah total penduduk seluruh daerah

Pengukuran didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar wilayah yang berupa besaran PDRB. Kriteria pengukurannya: Indeks = 0, berarti tidak terdapat kesenjangan ekonomi antar daerah; semakin besar nilai indeks, semakin besar tingkat

perbedaan ekonomi antarwilayah dengan rata-ratanya; semakin kecil nilai indeks, semakin menunjukkan pemerataan antarwilayah yang lebih baik.

6. *Convergence*

Perhitungan konsep konvergensi (*convergence*) yang digunakan adalah *absolute β convergence*. Persamaan *absolute β convergence* diberikan oleh:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \log\left(\frac{y_{iT}}{y_{i0}}\right) = c + \beta \log(y_{i0}) + \mu_i \dots\dots\dots(2.3)$$

Keterangan: **c** adalah konstanta, $\beta = - (1 - e^{-bT/T})$ adalah suatu parameter yang mengindikasikan hubungan antara pertumbuhan dan pendapatan awal, menjadi **b** kecepatan konvergensi (*speed of convergence*), **T** merupakan periode sampel, **y_i** berhubungan dengan pendapatan per kapita daerah **i**, **y_{i0}** berhubungan dengan pendapatan per kapita daerah **i** pada tahun awal, **y_{iT}** berhubungan dengan pendapatan per kapita daerah **i** pada tahun akhir, dan **μ** adalah *error term*. Ketika koefisien regresi pada pendapatan per kapita awal (**β**) bertanda negatif, berarti bahwa perekonomian daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya. Kondisi ini menunjukkan terjadi *absolute β convergence*.

Untuk melihat apakah **β** selain sesuai dengan konsep konvergensi juga signifikan secara statistik, maka dapat diuji dengan uji t pada tingkat kepercayaan 95%. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- Hipotesis nol: $H_0 : \beta \geq 0$
- Hipotesis alternatif: $H_1 : \beta < 0$

Konvergensi selain berhubungan dengan *β convergence* juga berhubungan dengan *σ convergence*. *σ convergence* digunakan untuk melihat apakah pola pertumbuhan dalam periode waktu tertentu disertai dengan penurunan dispersi pendapatan per kapita antar negara atau daerah. Sebagai konsep, *β convergence* dan *σ convergence* digunakan bersama dalam literatur yang berhubungan dengan konvergensi. Meskipun berbagai indikator ketimpangan dapat dianggap sebagai suatu pengukuran *σ convergence* (atau *divergence*), beberapa tulisan biasanya menggunakan indikator seperti variance (*standard deviation*) atau *coefficient variation*. (Villaverde & Maza (2009)). *Coefficient variation* (**σ**) diberikan oleh:

$$\sigma = s/\bar{y} \dots\dots\dots(2.4)$$

Keterangan:

- **s** adalah *standard deviation*
- \bar{y} adalah rata-rata pendapatan per kapita.

IV. ANALISIS DAN HASIL

IV.A. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi regional dihitung berdasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut data PDRB, baik PDRB total (Migas + tanpa migas) dan PDRB tanpa migas, kontributor terbesar bagi nilai tambah produksi Indonesia tahun 2005 – 2009 berasal dari provinsi-provinsi berikut (menurut urutan): DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Keenam provinsi tersebut menyumbang di atas 65 persen nilai tambah produksi nasional.

Memperhatikan tingkat pertumbuhannya, provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas tingkat pertumbuhan rata-rata nasional selama tahun 2005 hingga 2009 adalah DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Namun, apabila menggunakan data PDRB nonmigas, maka provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas tingkat pertumbuhan rata-rata nasional selama tahun 2005 hingga 2009 adalah Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Namun, perlu diketahui sebagai catatan, Sulawesi Barat hanya mencakup pertumbuhan tahun 2006 hingga 2009 karena data PDRB tahun 2004 belum ada sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2005 tidak dapat dihitung.

Berdasarkan distribusi PDRB dan laju pertumbuhannya, serta mengasumsikan bahwa total PDRB seluruh provinsi di Indonesia sama dengan PDB Indonesia, maka dapat diperhitungkan kontribusi daerah masing-masing terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2009 yang sekitar 5,29 persen, sekitar 70,01 persennya disumbang oleh provinsi-provinsi, antara lain, DKI Jakarta (19,73 persen), Jawa Timur (16,53 persen), Jawa Barat (15,46 persen), Jawa Tengah (8,43 persen), Sumatera Utara (6,14 persen), dan Riau (3,72 persen). Namun, berdasarkan data PDRB nonmigas, dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2009 yang sekitar 5,90 persen, sekitar 68,39 persennya disumbang oleh provinsi-provinsi, antara lain, DKI Jakarta (19,21 persen), Jawa Timur (15,90 persen), Jawa Barat (15,01 persen), Jawa Tengah (7,96 persen), Sumatera Utara (5,96 persen), dan Kalimantan Timur (4,35 persen).

Apabila memperhatikan basis lapangan usahanya, yang tercermin melalui indikator *location quotient* (LQ), maka provinsi-provinsi yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi tersebut relatif tidak memiliki basis lapangan usaha yang sama. DKI Jakarta, sebagai

provinsi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, konstruksi; perdagangan, hotel & restoran; pengangkutan & komunikasi; keuangan, real estate & Jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Jawa Timur memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, tanaman bahan makanan; peternakan; penggalian; listrik, gas & air bersih; perdagangan, hotel & restoran; pengangkutan & komunikasi; dan jasa-jasa. Jawa Barat memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, tanaman bahan makanan; peternakan; industri non migas; listrik, gas & air bersih; dan perdagangan, hotel & restoran. Jawa Tengah memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, tanaman bahan makanan; peternakan; industri migas; perdagangan, hotel & restoran; dan jasa-jasa. Sumatera Utara memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, tanaman bahan makanan; tanaman perkebunan; peternakan; kehutanan; perikanan; pengangkutan & komunikasi; dan jasa-jasa. Kalimantan Timur memiliki basis dalam lapangan usaha, antara lain, kehutanan; tambang migas; tambang non migas; dan industry migas.

IV.B. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Memperhatikan PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia (lampiran 4), provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah (menurut urutan) DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, dan Papua. Apabila menggunakan data PDRB nonmigas, maka provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah (menurut urutan) DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel di bawah berikut memberikan gambaran posisi PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia selama kurun waktu 2005-2009 menurut jenis data PDRB. Jenis data PDRB, yang dipublikasi biasanya meliputi, antara lain, atas dasar harga berlaku; atas dasar harga berlaku tanpa migas; atas dasar harga konstan tahun 2000; dan atas dasar harga konstan tahun 2000 tanpa migas.

Tabel 1
Posisi PDRB per Kapita Provinsi-provinsi di Indonesia
Tahun 2005-2009

No	Jenis Data PDRB	Provinsi	
		Di atas rata-rata	Di bawah rata-rata

1	Atas Dasar Harga Berlaku	Riau, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat
2	Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas	Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat
3	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	Riau, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara
4	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas	Sumatera Utara, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua	Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS PDRB Lapangan Usaha

Sebagai catatan, terdapat beberapa provinsi yang posisi PDRB per kapita yang kurang konsisten selama kurun waktu 2005-2009, yakni Aceh, Papua Barat, Kep. Bangka Belitung, dan Riau. PDRB per kapita Aceh, pada data PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000, menunjukkan bahwa PDRB per kapita Aceh di atas rata-rata nasional pada tahun 2005-2007 dan di bawah rata-rata nasional pada tahun 2008 dan 2009. PDRB per kapita Papua Barat, pada data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya di atas rata-rata nasional pada tahun 2005, 2008, dan 2009 dan di bawah rata-rata

nasional pada tahun 2006 dan 2007. PDRB per kapita Kep. Bangka Belitung, pada data PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas, di atas rata-rata nasional pada tahun 2005-2008, dan di bawah rata-rata nasional pada tahun 2009. PDRB per kapita Riau, pada data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, menunjukkan kenaikan di atas rata-rata nasional pada tahun 2006-2009, dan di bawah rata-rata nasional pada tahun 2005.

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Namun, apabila menggunakan data PDRB nonmigas per kapita, maka provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2008 adalah Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

IV.C. Disparitas PDRB Per Kapita

Hasil perhitungan indeks Williamson untuk provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa kenaikan PDB per kapita di Indonesia cenderung disertai dengan peningkatan ketimpangan PDRB per kapita. Provinsi-provinsi yang cenderung menunjukkan ketimpangan yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi lainnya terutama, antara lain, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah. Di antara semua provinsi tersebut, DKI Jakarta menunjukkan tingkat disparitas yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pusat, di Jakarta, sudah memberlakukan otonomi daerah namun orientasi pembangunannya masih cenderung di Jawa, khususnya provinsi DKI Jakarta.

IV.D. Pola Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Pola pertumbuhan PDRB per kapita dianalisis dengan pendekatan konvergensi. Awalnya, pengukuran konvergensi menggunakan model Baumol (Roemer (1996)) sebagai berikut:

$$\ln [(Y/N)_{i,t1}] - \ln [(Y/N)_{i,t0}] = a + b \ln [(Y/N)_{i,t0}] + \varepsilon_i \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

- $\ln(Y/N)$ adalah log pendapatan per kapita
- ε adalah *error term*
- i adalah indeks Negara

Hasil pengolahan persamaan (1) pada berbagai jenis data PDRB adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Hasil Pengolahan Model Baumol Pada PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia
Tahun 2005 - 2009

No	Jenis Data	Konstanta	Koefisien b	t-test Koef b	Sig.
1	PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan	0,255 (0,078)	- 0,051 (0,021)	-2,478	0,019
2	PDRB per Kapita Tanpa Migas atas dasar Harga Konstan	0,155 (0,083)	- 0,023 (0,022)	-1,037	0,308
3	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku	0,382 (0,119)	- 0,044 (0,030)	-1,477	0,150
4	PDRB per Kapita Tanpa Migas atas dasar harga berlaku	0,304 (0,128)	- 0,022 (0,033)	-0,674	0,505

Keterangan: (...) = standard error

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

Berdasarkan perhitungan konvergensi di atas, terlihat bahwa meskipun koefisien **b** pada keempat data menunjukkan tanda negatif, namun koefisien **b** yang signifikan hanya terdapat pada jenis data PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Dengan demikian, data PDRB per kapita yang menunjukkan secara signifikan bahwa daerah-daerah yang PDRB per kapitanya relatif rendah pada tahun 2005 memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi daripada daerah-daerah yang PDRB per kapitanya relatif tinggi hanya pada data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 per kapita. Oleh karenanya, data ini digunakan untuk melihat konvergensi melalui persamaan *absolute β convergence* berikut:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \log\left(\frac{y_{iT}}{y_{i0}}\right) = c + \beta \log(y_{i0}) + \mu_i \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

Perlu diketahui, selama kurun waktu 2005-2009, terdapat dua provinsi, yakni Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, mengalami tingkat pertumbuhan PDRB per kapita yang negatif. Oleh karenanya, persamaan *absolute β convergence* di atas dihitung dengan menggunakan data 33 provinsi dan 31 provinsi (menghilangkan Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua) untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasilnya. Berikut adalah hasil perhitungannya:

Tabel 3.
Hasil Pengolahan β convergence Pada PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia
Tahun 2005 - 2009

No	Jenis Data	Konstanta	Koefisien β	t-test koefisien β	Sig.
1	PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 untuk 33 provinsi	0,068 (0,022)	- 0,014 (0,006)	-2,442	0,020
2	PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 untuk 31 provinsi (2 provinsi yang tumbuh negatif dihilangkan)	0,053 (0,013)	- 0,009 (0,003)	-2,726	0,011

Keterangan: (...) = standard error

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

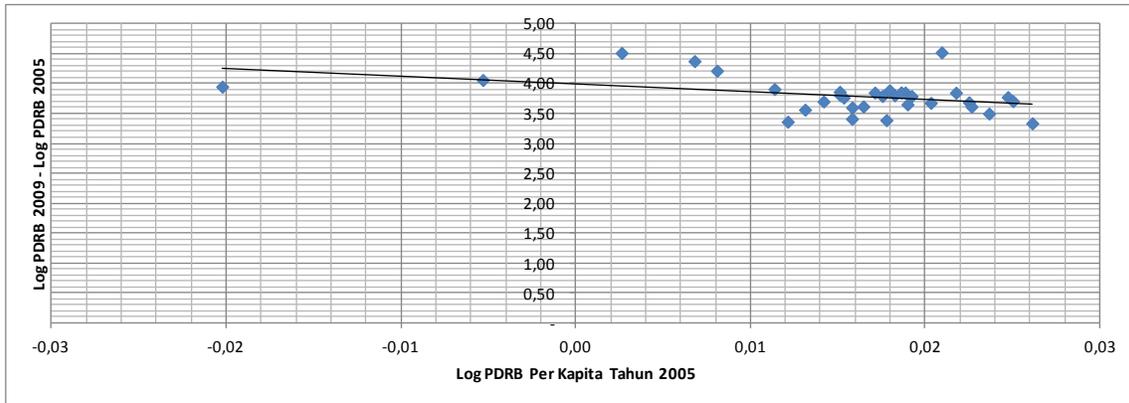
Dengan demikian, hasil perhitungan baik menggunakan seluruh provinsi di Indonesia (33 provinsi) maupun hanya 31 provinsi (mengeluarkan dua provinsi yang tumbuh negatif) menunjukkan hasil yang sama, yakni, pertumbuhan daerah-daerah yang PDRB per kapita-nya relatif rendah (di bawah rata-rata nasional) cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada daerah-daerah yang PDRB per kapitanya relatif tinggi (di atas rata-rata nasional).

Provinsi-provinsi yang PDRB per kapita tahun 2005 di bawah rata-rata nasional namun mengalami tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Di lain sisi, provinsi-provinsi yang PDRB per kapita tahun 2005 di atas rata-rata nasional, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional adalah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Papua. Bahkan, Aceh dan Papua mengalami tingkat pertumbuhan negatif. Di luar daerah-daerah tersebut, Jakarta yang memiliki PDRB per kapita tertinggi di Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional, sedangkan daerah-daerah lainnya merupakan daerah yang PDRB per kapitanya di bawah rata-rata dan mengalami tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata nasional.

Hasil perhitungan β -convergence tabel 3 di atas dapat memberi informasi mengenai kecepatan konvergensi yang terjadi selama tahun 2005-2009. Kecepatan konvergensi per tahunnya adalah sekitar 0,04 persen per tahun (persamaan 1) dan 0,03 persen per tahun (persamaan 2). Kecepatan konvergensi tersebut relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pertumbuhan daerah-daerah yang PDRB per kapitanya di bawah rata-rata nasional masih kurang cepat mengejar daerah-daerah yang PDRB per kapitanya di atas rata-rata nasional. Bahkan daerah-daerah yang PDRB per kapitanya di bawah rata-rata nasional seperti Sumatera

Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, NTB, NTT, Kalimantan Barat, dan Maluku mengalami tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata nasional. Di lain sisi, Jakarta, yang PDRB per kapitanya di atas rata-rata nasional mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

Persamaan 2 menunjukkan terdapat konvergensi dalam PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia selama tahun 2005 – 2009 dapat dilihat gambarnya sebagai berikut:



Gambar 1
Konvergensi PDRB antar Provinsi Di Indonesia, Tahun 2005-2009

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

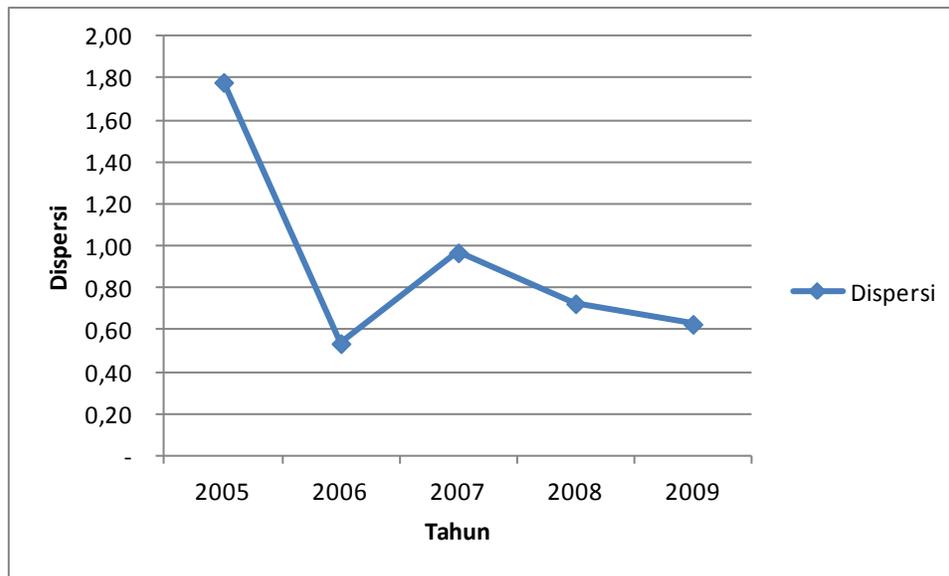
Konsep konvergensi, selain menggunakan pendekatan *absolute β convergence* (*beta convergence*) biasanya juga menggunakan pendekatan *σ -convergence* (*sigma convergence*). Hasil perhitungan *σ -convergence* ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Pengolahan σ -Convergence pada PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2005 - 2009

Tahun	σ -Convergence
2005	1,78
2006	0,54
2007	0,97
2008	0,73
2009	0,63

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

Tabel 4 di atas dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 2
Dispersi PDRB Per Kapita Tahun 2005 - 2009

Sumber: Hasil pengolahan data BPS

Gambar 2 menunjukkan bahwa meskipun tingkat dispersinya masih lebih tinggi dari tahun 2006, namun tren dispersi tahun 2005-2009 cenderung menurun. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita selama tahun 2005-2009 disertai dengan tingkat disparitas PDRB per kapita yang cenderung menurun.

Berdasarkan perhitungan *absolute β convergence* dan *σ -convergence*, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB per kapita Indonesia selama tahun 2005-2009 cenderung disertai dengan proses konvergensi. Namun, perlu juga dicatat bahwa kesimpulan hasil *σ -convergence* tersebut kurang sejalan dengan kesimpulan yang diperoleh dari perhitungan indeks Williamson. Oleh karenanya, berbeda dengan kesimpulan hasil perhitungan *absolute β convergence* yang cenderung bisa disepakati, namun kesimpulan hasil *σ -convergence* masih belum dapat diterima sepenuhnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut data PDRB, kontributor terbesar bagi nilai tambah produksi Indonesia tahun 2005 – 2009 berasal dari provinsi-provinsi berikut (menurut urutan): DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Keenam provinsi tersebut menyumbang di atas 65 persen nilai tambah produksi nasional.

Memperhatikan tingkat pertumbuhannya, provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas tingkat pertumbuhan rata-rata nasional selama tahun 2005 hingga 2009 adalah DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Namun, apabila menggunakan data PDRB nonmigas, maka provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas tingkat pertumbuhan rata-rata nasional selama tahun 2005 hingga 2009 adalah Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2009 yang sekitar 5,28 persen, sekitar 70,01 persennya disumbang oleh provinsi-provinsi, antara lain, DKI Jakarta (19,73 persen), Jawa Timur (16,53 persen), Jawa Barat (15,46 persen), Jawa Tengah (8,43 persen), Sumatera Utara (6,14 persen), dan Riau (3,72 persen). Namun, berdasarkan data PDRB nonmigas, dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2009 yang sekitar 5,89 persen, sekitar 68,39 persennya disumbang oleh provinsi-provinsi, antara lain, DKI Jakarta (19,21 persen), Jawa Timur (15,90 persen), Jawa Barat (15,01 persen), Jawa Tengah (7,96 persen), Sumatera Utara (5,96 persen), dan Kalimantan Timur (4,35 persen). Namun, apabila memperhatikan basis lapangan usahanya, yang tercermin melalui indikator *location quotient* (LQ), maka provinsi-provinsi yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi tersebut relatif tidak memiliki basis lapangan usaha yang sama.

Memperhatikan PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia, provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah (menurut urutan) DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, dan Papua. Apabila menggunakan data PDRB nonmigas, maka provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya selalu di atas rata-rata PDRB per kapita nasional dari tahun 2005 hingga 2009 adalah (menurut urutan) DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Secara umum, data PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa provinsi-provinsi yang PDRB per kapitanya relatif rendah pada tahun 2005 mengalami tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi daripada provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan PDRB per kapitanya relatif tinggi. Namun, dari keempat jenis data PDRB yang digunakan, hanya data PDRB menurut harga konstan tahun 2000 per kapita saja yang menunjukkan kecenderungan tersebut secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil perhitungan *absolute β convergence* atau *unconditional β convergence*.

Konsep konvergensi biasanya diinterpretasikan selain menggunakan pendekatan *absolute β convergence* juga *σ -convergence*. Hasil perhitungan *σ -convergence* menunjukkan bahwa meskipun tingkat dispersinya masih lebih tinggi dari tahun 2006, namun tren dispersi tahun

2005-2009 cenderung menurun. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita selama tahun 2005-2009 disertai dengan tingkat disparitas PDRB per kapita yang cenderung menurun.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa kesimpulan σ -convergence ternyata kurang sejalan dengan kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan indeks Williamson. Oleh karenanya, kesimpulan mengenai tren disparitas kurang dapat diterima sepenuhnya.

Namun, penelitian ini belum memperhitungkan β -conditional convergence. β -conditional convergence dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi konvergensi. Oleh karenanya, penelitian ini perlu dilengkapi dengan hasil perhitungan β -conditional convergence agar kesimpulan konvergensi menjadi lebih lengkap.

DAFTAR RUJUKAN

- Barro, Robert J., & Xavier Sala-i-Martin. 1995. *Economic Growth*. Singapura: McGraw-Hill.
- Chi, An. 2005. "Catch-up and Regional Disparity in Economic Growth: An Empirical Evidence of the Convergence Hypothesis in China Case". *Forum of International Development Studies*, 30 (Sep. 2005)
- Daryanto, Arief, dan Yundy Hafizrianda. 2010. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Dowling, J. Malcolm, and Ma. Rebecca Valenzuela. 2010. *Economic Development in Asia*. Singapore: Thomson.
- Nazara, Suahasil, 2010. "Pemerataan Antardaerah sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan". *Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, di Balai Sidang UI Depok, 10 Maret.
- Perkins, Dwight H., Steven Radelet, Donald R. Snodgrass, Malcom Gillis, and Michael Roemer. (2001). *Economics of Development*. 5th edition. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Potipiti, Tanapong, 2009. "Output Convergence among Provinces in Thailand". *Thammasat Economic Journal*. Vol. 27, No. 4. (December 2009).
- Roemer, David, 1996. *Advanced Macroeconomics*. Singapore: McGraw-Hill.
- Rustiadi, Erman., Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shin, Inyong, 2008. "Income Inequality and Economic Growth". *Munich Personal RePEc Archive* (MPRA) Paper No. 24397 (31 march 2008).

- Stiglitz, J.E., A. Sen, dan J.P. Fitoussi. 2011. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kemajuan?* (terjemahan: Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur). Bintaro: Marjin Kiri
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Villaverde, Jose, and Adolfo Maza. 2009. "Measurement of Regional Economic Disparities". *United Nations University-Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) Working Papers*. W-2009/12.
- Weil, David N., 2009. *Economic Growth*. Boston: Pearson Education, Inc.